

**MENJADI PEDAGANG DALAM KUASA SULTAN: ANALISIS
WACANA KRITIS TENTANG KAJIAN DISIPLIN DALAM RELOKASI
PKL MALIOBORO**



SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Syarat Memeroleh Gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

ILHAM MUHAMMAD

19321089

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi

MENJADI PEDAGANG DALAM KUASA SULTAN:

**ANALISIS WACANA KRITIS TENTANG KAJIAN DISIPLIN DALAM RELOKASI
PKL MALIOBORO**

Disusun Oleh:

ILHAM MUHAMMAD

19321089

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan
dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,



Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.

NIDN 0512048032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

MENJADI PEDAGANG DALAM KUASA SULTAN:

**ANALISIS WACANA KRITIS TENTANG KAJIAN DISIPLIN DALAM RELOKASI
PKL MALIOBORO**

Disusun Oleh:

ILHAM MUHAMMAD

19321089

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas

Islam

Tanggal: 21 Februari 2023

Dewan Penguji:

1. Ketua: Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.
NIDN 0512048302
2. Anggota: Dr. Zaki Habibi, S.I.P., M.Comms
NIDN 0517078101

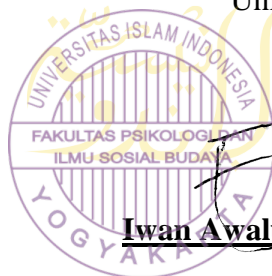

(.....)


(.....)

Mengetahui.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN 0506038201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Muhammad

Nomor mahasiswa : 19321089

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ilham Muhammad

19321089

MOTTO

“Biarkan dunia mengubah Anda dan Anda dapat mengubah dunia”

(Che Guevara)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada seluruh umat manusia

المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث
الاسلامية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Menjadi Pedagang dalam Kuasa Sultan: Analisis Wacana Kritis tentang Kajian Disiplin dalam Relokasi PKL Malioboro”

Dalam pengerjaan penelitian ini peneliti mendapat banyak halangan dan rintangan. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak dan orang-orang terdekat peneliti, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Erni Sulistyawati, selaku ibu peneliti yang selalu mendukung secara moral, doa, dan memberikan motivasi dikala sulit.
2. Eddy Siswoyo, selaku ayah peneliti yang selalu mendoakan peneliti dan mendukung dalam keadaan apapun.
3. Bapak Holy Rafika Dhona, selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu menjadi tempat bertanya peneliti kapanpun. Terimakasih juga kepada Pak Holy, tanpa beliau penelitian ini tidak akan dapat berjalan.
4. Rhesa Rahman dan Awan Rahadiyan, selaku saudara peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti.
5. Untuk narasumber yang sudah memberikan informasi dan data yang mencukupi. Jikalau bukan karena mereka peneliti masih kesulitan mencari data.
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi UII angkatan 2019, terima kasih untuk setiap pengalaman yang mengesankan.
8. Seluruh teman-teman SMA yang menjadi tempat *sambat* peneliti.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan GEOMEDIA, semangat kawan semua ada jalannya.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga orang-orang yang sudah peneliti sebutkan diatas akan dibalas kebaikannya, Amin. Semoga penelitian ini akan berguna bagi seluruh pihak, serta dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya. Peneliti sadar akan kekurangan dari penelitian ini, maka dari itu harapannya peneliti selanjutnya akan memberikan kritik dan saran, dan menjadikan penelitian-penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Tentunya semoga penelitian ini berguna bagi seluruh umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta 30 Januari 2023

Penulis,



Ilham Muhammad



DAFTAR ISI

JUDUL:	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Narasumber/Informan Penelitian.....	15
4. Pengumpulan Data.....	15
5. Analisa Data	17
6. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian.....	18
BAB II	19
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	19
B. Deskripsi Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Narasumber Penelitian.....	22
BAB III	23
3.1 Temuan.....	23
3.1.1 Sultan dalam Disiplin Ruang di Keraton Jawa	23

3.1.2 Peran Raja dan Wacana dalam Penertiban PKL Malioboro.....	37
3.2 Pembahasan.....	62
BAB IV.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Keterbatasan Penelitian	66
C. Saran/Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Catur Gatra Tunggal	31
Gambar 3.2	Konsep Sumbu Filosofi	32
Gambar 3.3	Tampak Depan Teras Malioboro 1	40
Gambar 3.4	Area Kuliner Teras Malioboro 1	41
Gambar 3.5	Tampak dalam Area Teras Malioboro 1	42
Gambar 3.6	Teras Malioboro 2 yang Dekat dengan Jalan Mataram Sekaligus Area Kuliner Secara Mayoritas	43
Gambar 3.7	Tampak dalam Teras Malioboro 1	44
Gambar 3.8	Teras Malioboro 2 dari Jalan Malioboro	45
Gambar 3.9	Denah Teras Malioboro 1	47
Gambar 3.10	Bagian Utara Teras Malioboro 2	50
Gambar 3.11	Salah Satu Tampilan Kuliner yang Ada di Bagian Utara dan Selatan Teras Malioboro 2	51

ABSTRAK

Muhammad, Ilham. 19321089 (2023). Menjadi Pedagang dalam Kuasa Sultan: Analisis Wacana Kritis tentang Kajian Disiplin dalam Relokasi PKL Malioboro. (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Relokasi merupakan proses pemindahan suatu tempat ke tempat lainnya, termasuk individu yang menempatnya. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi pada PKL Malioboro yang direlokasi oleh Sultan ke Teras Malioboro 1 dan 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sultan digambarkan dalam sejarah Keraton Jawa, serta mengetahui peran Sultan dan sejarah/wacana dalam penertiban PKL Malioboro. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Narasumber penelitian ini yaitu PKL Malioboro yang terdampak relokasi, dengan kata lain PKL Malioboro yang berdagang sebelum terjadi relokasi hingga sesudah relokasi. Hasil penelitian ini yaitu penggambaran Sultan dalam sejarah Kraton Jawa terlihat dalam konsep relasi *kawula-gusti*. Seperti yang dituliskan Moertono (2017) dimana konsep *kawula-gusti* menggambarkan status manusia yang paling rendah dan paling tinggi dalam masyarakat. Dalam penertiban PKL Malioboro Sultan menjadi seseorang yang memberikan keputusan mutlak. Sultan yang memerintahkan untuk dilakukan relokasi kepada para PKL Malioboro. Namun setelah dilakukan relokasi peran Sultan sedikit menjauh dari para PKL.

Kata kunci: PKL Malioboro, komunikasi geografi, disiplin, Sultan, Kuasa



ABSTRACT

Relocation is the process of moving from one place to another, including the individuals who occupy it. As was the case with the Malioboro street vendors who were relocated by the Sultan to Teras Malioboro 1 and 2. This study aims to find out how the Sultan is depicted in the history of the Javanese Palace, and to know the role of the Sultan and history/discourse in controlling Malioboro street vendors. This research is included in the qualitative descriptive research using discourse analysis method. Data collection was carried out by means of observation, interviews, and literature studies. The source of this research is the Malioboro street vendors who are relocating, in other words the Malioboro street vendors who trade before the relocation takes place until after the relocation. The results of this study are that the depiction of the Sultan in the history of the Javanese Kraton is seen in the concept of the kawula-gusti relationship. As written by Moertono (2017) where the concept of kawula-gusti describes the lowest and highest human status in society. In controlling Malioboro street vendors, the Sultan is someone who makes absolute decisions. The Sultan ordered the relocation of Malioboro street vendors to be carried out. However, after relocating, the Sultan's role was slightly away from the street vendors.

Keywords: *Malioboro street vendors, geography communication, discipline, Sultan, Power*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relokasi berkaitan dengan mengkonstruksi tempat yang baru termasuk kekayaan, tanah, dan sarana umum lainnya (Detia: 2020). Relokasi memiliki arti singkat yaitu pemindahan tempat (kbbi.kemdikbud.go.id, 11 Juli 2022). Ada pula pengertian lain yang diungkapkan oleh Purnomo (2016) dimana relokasi tidak hanya peristiwa yang memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dalam pemindahan relokasi, perilaku sehari-hari dan identitas yang ada dalam individu juga ikut berpindah. Seperti yang dikatakan Detia (2020) bahwa relokasi membangun tempat baru salah satunya sarana umum seperti pasar. Dapat dikatakan relokasi pasar terjadi ketika tempat berdagang yang lama dipindahkan ke lokasi yang baru, dimana tempat baru lebih terasa nyaman dan tertata, serta tempat dan lokasi yang baru sudah diatur dan diputuskan oleh Pemda setempat (Fajar dalam Yuliyanti, 2018). Upaya relokasi tentunya tidak lepas dari regulasi pemerintah setempat. Regulasi ini hadir guna mengatur bagaimana relokasi dijalankan, karena memang relokasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat. Salah satu relokasi PKL yang menarik adalah relokasi PKL dengan model pemerintah yang spesifik seperti Yogyakarta yakni relokasi PKL Malioboro.

PKL Malioboro mulai direlokasi pada tanggal 1 Februari 2022 (travel.kompas.com, 8 Februari 2022). Uniknyalah salah satu alasan relokasi PKL ini adalah menuruti Gagasan Area Sumbu Filosofis Kraton (nasional.tempo.co, 27 Januari 2022). Area Sumbu Filosofi adalah garis imajiner menghubungkan dari Area Tugu lalu melewati Area Kerajaan Keraton Yogyakarta hingga paling Selatan yaitu Panggung Krapyak. Garis ini tidak benar-benar lurus maka disebut garis imajiner. Menurut Sultan Yogyakarta ia akan dinilai melanggar kerja sama ketika UNESCO datang dan melihat trotoar sepanjang Jalan Malioboro yang merupakan bagian dari garis imajiner itu dibiarkan untuk berdagang para PKL. Dalam kasus ini, garis imajiner yang merupakan produk pengetahuan Kraton, menjadi dasar pembangunan ruang modern. Penggunaan pengetahuan Kraton inilah yang merupakan kasus spesifik dalam relokasi PKL Malioboro.

Selain alasan tersebut, relokasi dilakukan karena Sultan merasa sudah lama menunggu untuk mengatur area yang selalu ramai manusia yaitu Malioboro, dimana saat ini sudah dirombak dan dibenahi dari utara sampai selatan untuk jalur pedestrian.

Bagi Sultan HB X para PKL selama ini menempati tempat dagang yang bukan ditujukan untuk para PKL berdagang. Tempat berdagang yang ada di sepanjang Jalan Malioboro bukan ditujukan untuk para PKL, melainkan menjadi hak para toko yang dimiliki pemerintah/toko yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Alasan ketiga, relokasi PKL Malioboro dilakukan dengan tujuan untuk mengatur trotoar agar akses jalan yang ada di sekitar area Malioboro dapat menjadi tempat pelayanan kota yang memadai. Trotoar juga ditertibkan dengan tujuan untuk membangun akses yang mumpuni bagi para pejalan kaki. (nasional.tempo.co, 27 Januari 2022)

Jumlah PKL di wilayah Malioboro berjumlah kurang lebih 2000 pedagang (travel.kompas.com, 20 Januari 2022). Relokasi PKL Malioboro didasari dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro. Pedagang yang berjumlah sekitar dua ribu tadi direlokasi dan dibagi ke dalam dua tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Mereka dibagi ke dua tempat yang dinamakan Teras Malioboro 1 dan 2 (travel.kompas.com, 20 Januari 2022). Lokasi Teras Malioboro 1 bertempat pada gedung lama/bekas bioskop yang bernama Bioskop Indra. Untuk Teras Malioboro 2 berlokasi pada gedung lama/bekas milik Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka yang sudah terdaftar dalam Pemerintah Kota dipindahkan ke dua tempat tersebut dan diberikan lapak masing-masing.

Pro dan Kontra terjadi di antara pedagang kaki lima Malioboro. DPRD Kota Yogyakarta menanggapi hal tersebut dengan cara membentuk Panitia khusus (Pansus) guna menampung tanggapan dan kritik para PKL atas keresahan dan keluhan mereka terkait rencana Relokasi (tirto.id, 17 Januari 2022). Banyak penolakan yang terjadi dari para PKL salah satunya ketika mereka menolak jika dilakukan relokasi dalam waktu dekat (cnn.indonesia.com, 26 Januari 2022). PKL Malioboro mengajukan rasa keberatan dan keluhan mereka ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH) hingga ke DPRD Yogyakarta. Para PKL Malioboro semata-mata hanya ingin proses relokasi dilakukan mundur hingga setelah lebaran. Namun Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY menolak permintaan tersebut. Terjadi protes dari para pedagang yang akan terelokasi di kantor DPRD Kota Yogyakarta pada Senin, 17 Januari 2022, protes terjadi semata-mata karena bentuk penolakan dari proyek relokasi. Para PKL menjalankan aksi protes lantaran mereka berargumen bahwa proyek relokasi ini berjalan tertutup dan para pedagang merasa dirugikan akibat proyek ini. Bakti Laksono yang menjadi Wakil Ketua Paguyuban dari para pedagang yang ada di Malioboro,

berargumen mengenai lokasi baru yang akan ditempati tidak mumpuni, terkhusus tempat baru yang akan digunakan para pedagang yang lesehan (travel.tempo.co, 18 Januari 2022). Para PKL Malioboro beranggapan bahwa relokasi ini hanya memberikan kerugian kepada para pedagang. Tentunya protes yang terjadi memiliki dasar tersendiri, para PKL banyak memiliki keresahan dan rasa pesimis akan tempat baru setelah direlokasi.

Kuasa Sultan dalam proses ini sangat terlihat jelas dalam relokasi PKL Malioboro. Pertama, adalah karena alasan relokasi untuk menaati imaji sumbu imajiner yang merupakan representasi kuasa Sultan. Kedua, Sultan mengabaikan berbagai protes yang dilakukan oleh PKL. Oleh karenanya ketimbang mengadopsi konsep-konsep komunikasi yang biasa digunakan dalam melihat masalah relokasi, riset ini akan menguji kasus ini dengan konsep disiplin yang dipopulerkan oleh Michel Foucault. Proses relokasi baik resistensi maupun keberhasilannya adalah karena pendisiplinan Yogyakarta dan masyarakatnya kepada Sultan, dan oleh karenanya melibatkan kuasa Sultan sebagai penguasa Yogyakarta.

Penelitian mengenai kuasa Sultan Yogyakarta pada situs Garba Rujukan Digital/Garuda (garuda.kemdikbud.go.id, 3 Juli 2022) biasanya terfokus pada Otonomi Sultan dan Kepatuhan Pada Pusat di era reformasi. Seperti yang ditulis oleh Saputra & Dhona (2022) mengenai Dispersi Wacana Ruang Publik, Hikmawan & Ismalia (2019) membahas Relasi Kuasa di Ruang Publik, dan Kadarsih (2008) membahas Demokrasi dalam Ruang Publik. Selanjutnya ada pula pembahasan mengenai Sultan Ground yang dibahas dari Hukum Tanah Nasional. Ada pula Sabdatama dan Sabdaraja yang membahas mengenai pro kontra dikeluarkannya sabda tersebut di internal dan eksternal keraton. Dan terdapat hasil dimana Sabda tersebut bertentangan dengan UUK DIY dan tidak tepat dijadikan dasar untuk mengubah UUK DIY. Ada juga yang fokus dengan peran Sekber Keistimewaan DIY dalam penetapan Sultan X sebagai Gubernur DIY. Dibahas pula mengenai pro penetapan dan pro pemilihan. Dimana antara kedua kubu pro yang ada dimenangkan oleh pro penetapan. Penelitian lainnya yaitu mengenai pemilihan Sri Sultan Perempuan. Membahas mengenai masalah Sri Sultan yang harus laki-laki, namun saat ini Sultan X tidak memiliki keturunan laki-laki. Penelitian ini melihat masalah dari peraturan/undang-undang serta sumber yang terkait.

Sementara itu hingga 7 April 2022 artikel yang menggunakan kata kunci “relokasi” berjumlah 304 dokumen, namun hanya ada satu artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmu komunikasi menurut situs Garba Rujukan Digital/Garuda (Kemendikbud,

2022). Satu jurnal komunikasi tadi membahas mengenai cara dari Pihak Provinsi Sulawesi Tenggara mengkomunikasikan agenda relokasi masyarakat yang ada di Kota Lama, Kendari. Kebanyakan dari judul yang mengangkat kata “relokasi” membahas mengenai dampak di bidang sosial, ekonomi, dan teknik cara penyampaian relokasi. Seperti yang dilakukan oleh Anisa Noor Afiati tahun 2020, membahas relokasi di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, penelitian Reynaldo Christian Aotama dan Deavy Rosaline Henny Klavert tahun 2021, dan karya Alfian S dan kawan-kawan pada tahun 2021, yang membahas relokasi di bidang sosial. Untuk Miftahul Jannah tahun 2019, relokasi di bidang ekonomi. Penelitian yang dilakukan A. N. Hafidzhi dan A. Sugiri, tahun 2020 mengenai tingkat keberhasilan relokasi. Karya Ita Sugnilitas, Zulfiah Larisu, dan Sutiyana Fachruddin 2017, mengangkat tentang teknik komunikasi pemerintah dalam melakukan relokasi yang mana ini diterbitkan oleh ilmu komunikasi. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan karena berusaha mengetahui pendisiplinan yang dilakukan melalui kuasa Sultan. Seperti pengorganisasian ruang dan waktu, pengaturan perilaku, dan sistem pengawasan PKL.

Penelitian ini masuk dalam sub-disiplin Komunikasi Geografi, karena membahas mengenai bagaimana penciptaan ruang bagi PKL yang melibatkan proses komunikasi yang partikular. Janson & Falkheimer (2006) berpendapat bahwa komunikasi geografi berfokus tentang cara dari komunikasi memproduksi ruang dan cara ruang memproduksi komunikasi. Pada komunikasi geografi ada tiga tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian komunikasi yang dikemukakan oleh Janson & Falkheimer dalam Dhona (2018). Tahapan tersebut berupa tahap pendekatan transmisi, ritual, dan spasial. Dimana pada tahapan ketiga membuat komunikasi geografi menjadi studi yang memiliki perspektif unik. Dalam perspektif yang unik disini diungkapkan bahwa ruang merupakan sesuatu yang tidak stabil. Ruang terbentuk dari faktor eksternal, selanjutnya ruang juga menjadi tempat terjadinya komunikasi yang sifatnya juga tidak stabil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara ruang dan komunikasi menjadi saling timbal balik, dimana ruang memengaruhi/membentuk komunikasi dan komunikasi memengaruhi/membentuk ruang. Riset ini melihat keberhasilan relokasi PKL Malioboro adalah karena hasil dari pendisiplinan subjek PKL sebagai objek kuasa Sultan dan bukan sebagai objek regulasi pemerintah yang biasa. Pendisiplinan PKL ini dilakukan melalui diskursus dan praktik diskursus yang merupakan bagian dari proses komunikasi.

B. Rumusan Masalah

Relokasi PKL Malioboro sudah dilakukan. PKL sudah dipindah ke tempat yang ditentukan. Keberhasilan relokasi PKL Malioboro dalam penelitian ini dianggap sebagai efek dari disiplin PKL Malioboro, yakni sebuah mekanisme kuasa yang mengatur perilaku individu-individu dalam sebuah tubuh masyarakat. Oleh karena rumusan masalah dari riset ini adalah: **Bagaimana pendisiplinan PKL Malioboro dalam kasus relokasi Malioboro?**

Pendisiplinan dalam riset ini adalah pendisiplinan dalam term Michel Foucault yang dilakukan dengan mengatur pengorganisasi ruang (misalnya arsitektural, peta dll), pengaturan waktu (time-table) serta perilaku dan aktivitas orang. Upaya ini biasa dilakukan dengan sistem pengawasan (surveillance) yang kompleks. Dengan demikian pertanyaan penelitiannya akan berupa:

1. Bagaimana raja/sultan dalam disiplin ruang/pasar di dalam sejarah kraton Jawa dan Malioboro?
2. Bagaimana raja/sultan dalam penertiban PKL Malioboro dan peran wacana/sejarah dalam *event* tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pertanyaan yang sudah terbentuk dapat disimpulkan bahwa tujuan karya ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana raja/sultan dalam disiplin ruang/pasar di dalam sejarah kraton Jawa dan Malioboro.
2. Mengetahui bagaimana raja/sultan dalam penertiban PKL Malioboro dan peran wacana/sejarah dalam *event* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi PKL, masyarakat, serta pemerintah daerah. Sehingga nantinya semua pembaca penelitian ini akan lebih memahami relokasi yang dilihat dari perspektif komunikasi.

2. Manfaat Teoritis

Tulisan ini berguna menjadi rujukan /sumber bagi para peneliti selanjutnya di bidang relokasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang berkaitan dengan komunikasi geografi dan disiplin. Penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah perspektif dalam melihat relokasi menggunakan perspektif komunikasi geografi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang membahas mengenai relokasi karya dari Anisa Noor Afiati tahun 2020. Beliau merupakan mahasiswa dari prodi sosiologi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Penelitian yang membahas mengenai **Penataan PKL dan Keberadaan JPM di tanah Abang, Jakarta**. Penelitian ini bertujuan untuk yaitu menjelaskan bagaimana fungsi dari diaturnya mengenai penataan para PKL yang berlokasi di Tanah Abang. Penataan dilakukan karena para PKL menjadi salah satu penyebab kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Tujuan lainnya yaitu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dampak dari relokasi pedagang kaki lima setelah penataan di Tanah Abang. Temuan dari karya ini terdapat fungsi nyata dan tersembunyi dilakukannya pengaturan dan penataan PKL Tanah Abang. Fungsi nyata seperti halnya mengurangi kemacetan di Jalan Jatibaru Tanah Abang dan kelayakan dan kenyamanan tempat usaha menjadi lebih baik. Ada pula fungsi tersembunyi akibat adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan syarat hanya warga yang memiliki KTP Jakarta maka ada kecemburuan dari PKL yang bukan dari Jakarta atau perantau. Terdapat efek positif dan negatif pada kalangan PKL setelah dilakukannya proyek ini. Proyek ini menjadi positif karena aktivitas yang dilakukan pedagang menjadi terkoordinir, pedagang juga lebih menjadi sadar mengenai kebersihan lingkungan disekitarnya, jembatan yang ditujukan untuk penyeberangan dapat meminimalisir macet yang ada pada Tanah Abang. Proyek relokasi ini juga memunculkan kesempatan usaha bagi warga sekitar Tanah Abang, dilakukan pula pembinaan pedagang bagi mereka yang sudah mendata dan didata di lembaga dinas UMKM, peningkatan pendapatan ekonomi bagi para pedagang. Lalu untuk dampak negatifnya seperti menimbulkan kecemburuan sosial antar para pedagang serta menurunnya hasil dagang bagi para pedagang yang berlokasi di trotoar. Akhirnya proyek ini dikatakan berhasil dilakukan mengingat kemacetan yang dikarenakan oleh para PKL dapat berkurang setelah dilakukan relokasi.

Penelitian dilakukan oleh Reynaldo Christian Aotama dan Deavy Rosaline Henny Klavert tahun 2021, Fakultas Ekonomi, Universitas Sariputra Indonesia, Tomohon. Penelitian yang kedua ini membahas mengenai **Dampak pada bidang Sosial yang dirasakan di lingkungan para PKL yang berada pada Wisata Kuliner, Tomohon Setelah Dilakukannya Relokasi**. Karya ini akan memberikan kita wawasan mengenai dampak dari proyek relokasi pada lingkungan sosial PKL

di wilayah tersebut. Dimana dalam karya ini dampak akan dilihat dari pandangan atau argumen para PKL. Narasumber dalam tulisan ini berupa PKL yang direlokasi ke Kawasan Wisata Kuliner. Hasil dan pembahasan yang ada dalam penelitian berupa dampak dari relokasi itu sendiri. Dampaknya berupa kepastian dan jaminan hukum untuk para PKL yang dianggap ilegal setelah direlokasi mereka mendapat izin usaha dari pemerintah, jaminan keamanan dan ketertiban usaha bagi para pedagang terutama terjaga dari pemungutan ilegal yang dilakukan oleh “preman”, kenyamanan dan kebersihan usaha dijamin. Mereka tidak perlu bongkar muat tempat berdagang melainkan sudah disediakan tempat untuk berdagang. Ada pula petugas kebersihan yang membantu membersihkan tempat. Ada pula dampak lain seperti adanya persaingan antar pedagang. Tingginya tingkat persaingan di lokasi relokasi membuat para pedagang takut kehilangan konsumen. Dampak selanjutnya hubungan para pedagang yang menjadi kenal satu sama lain di tempat Kawasan Wisata Kuliner. Relokasi ini memberikan dampak sosial yang baik bagi para pedagang. Yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus memperhatikan mengenai peremajaan lokasi Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon.

Karya selanjutnya dilakukan oleh Miftahul Jannah tahun 2019. Beliau merupakan mahasiswa jurusan ekonomi syariah UIN Antasari. Karya yang ketiga ini membahas **mengenai Dampak dari Relokasi Pasar Ampah terhadap Perekonomian para PKL yang berlokasi di Dusun Tengah**. Karya ini memberikan pengetahuan mengenai dampak dari relokasi yang dilakukan di Dusun Tengah. Sumber data dari penelitian ini berasal dari informan yaitu Kepala UPT Pasar Ampah dan Pedagang Kaki Lima yang mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa dampak yang dirasakan para pedagang setelah dilakukan proyek relokasi. Para PKL merasakan bahwa tempat baru untuk berdagang kurang strategis. Mereka juga merasakan bahwa pelanggan yang ada sangat berkurang drastis. Tentunya ini akan mengarah ke pendapatan pedagang yang berkurang setelah direlokasi. PKL dalam karya ini merasakan adanya perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya proyek relokasi.

Penelitian ini merupakan karya dari Ita Sugnilitas, Zulfiah Larisu, dan Sutiyana Fachruddin, pada tahun 2017. Dari Universitas Halu Oleo, Ilmu Komunikasi, Kendari. Penelitian keempat disini membahas tentang **bagaimana cara yang dilakukan Pemda Sulawesi Tenggara untuk mengkomunikasikan proses relokasi masyarakat Kendari, Kota Lama**. Karya Ita dan kawan-kawan memiliki

tujuan untuk mengetahui cara/teknik komunikasi apa yang dilakukan Pemda Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan proyek relokasi Kota Lama serta apa saja hal-hal yang dapat memengaruhinya. Subjek dari karya ini berupa seluruh pegawai dalam Divisi Humas dan Pemda Sulawesi Tenggara yang berjumlah 105 narasumber. Hasil dari penelitian ini berupa teknik yang digunakan oleh Divisi Humas dan Pemda Sulawesi Tenggara. Mereka menggunakan teknik komunikasi pertama yaitu informatif dan yang kedua persuasif. Pertama teknik komunikasi informatif merupakan teknik komunikasi dengan menyampaikan informasi agar khalayak menjadi paham akan informasi tersebut. Sedangkan teknik informasi persuasif merupakan teknik penyampaian informasi yang bertujuan agar khalayak menerima paham tertentu dan melakukan suatu kegiatan tertentu pula. Penyampaian pesan tentunya dilakukan dengan pemilihan komunikator, pemilihan media yang tepat seperti penyampaian langsung, negosiasi dan lainnya. Adapula faktor penghambat dalam proses relokasi seperti realisasi dana anggaran dan tenaga teknik perencanaan. Tentunya pemerintah membutuhkan waktu dalam realisasinya.

Penelitian dari Erwin S dan Ahmad Sukri H, tahun 2020. Karya kelima disini membahas mengenai **“Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Sibuhuan (2013-2018)”**. Karya ini akan memberikan pengetahuan mengenai sejarah relokasi Pasar Tradisional Sibuhuan. Dibahas pula mulai dari latar belakang pedagang melakukan penolakan, dan akibat yang dirasakan para pedagang pasar setelah dilakukannya proyek relokasi. Hasil dari penelitian ini dibahas mengenai sejarah berdirinya pasar sibuhuan dari masa ke masa. Proyek relokasi ini dilakukan karena adanya aturan atau kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi macet yang terjadi. Tujuan lain seperti untuk pelebaran jalan serta membangun Taman Sibuhuan. Dijelaskan pula dalam hasil penelitian berupa proses relokasi pedagang pasar tradisional sibuhuan telah sesuai koridor. Lalu dijelaskan juga mengenai respon dari pedagang yang mana respon mereka menunjukkan bahwa relokasi ini kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pasar yang baru lokasinya tidak strategis, mengakibatkan menurunnya pendapatan para pedagang. Maka dari itu para pedagang menolak untuk dipindah. Dampak yang paling dirasa sebelum relokasi dan sesudah yaitu pedagang mengatakan bahwa sebelum relokasi dagangan mereka lebih sering laku habis daripada sesudah relokasi.

Penelitian dilakukan oleh Hafidzhi dan Sugiri, tahun 2020. Penelitian keenam disini membahas tentang **Tingkatan Keberhasilan yang diraih dari Merelokasi**

Pasar Marelان, Medan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat tingkat keberhasilan dan hambatan dari pelaksanaan penataan pedagang di Relokasi Pasar Marelان. Temuan dalam karya ini berupa aspek yang memengaruhi relokasi Pasar Marelان Medan salah satunya kemacetan tinggi yang terletak pada jalan protokol dan jalan masuk pasar. Ada pula penyebab lainnya seperti penghasilan pedagang setelah dilakukan relokasi justru meningkat. Selanjutnya fasilitas yang disediakan pemerintah juga sudah sesuai dengan pajak yang dibayarkan oleh para pedagang. Para pedagang sudah paham mengapa dilakukan relokasi terhadap Pasar Marelان. Alhasil proyek ini dianggap sukses dan tepat sasaran dalam mengatasi masalah yang ada.

Penelitian dilakukan oleh Alfian S dan kawan-kawan, tahun 2021. Penelitian ketujuh disini membahas mengenai **akibat dari proyek relokasi masyarakat pemukiman Kalijodo yang terletak di Jakarta.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran keruangan area Kalijodo sebelum dan setelah dilakukannya proyek ini. Akan dibahas pula mengenai akibat yang terjadi setelah dilakukannya relokasi. Hasil dari karya ini sebagai berikut, di awal pembahasan dijelaskan sekilas mengenai sejarah Kalijodo dan pelanggaran apa saja yang ada di tempat tersebut. Dijelaskan pula kondisi lingkungan Kalijodo sebelum relokasi, dikatakan dalam penelitian ini bahwa area ini membuat warga sekitar resah. Dimana aktivitas rutin di setiap harinya tidak sesuai dengan nilai agama dan hukum yang berlaku. Lalu dijelaskan pula kondisi setelah direlokasi dimana wilayah baru yakni Marunda lebih cocok untuk dihuni dan nyaman daripada Kalijodo. Ada pula dampak lainnya berupa perbaikan moral bagi warga Kalijodo setelah direlokasi. Setelah direlokasi para warga juga mendapat fasilitas yang lengkap serta ada program pemberdayaan manusia melalui pengrajin batik. Maka dapat dikatakan bahwa relokasi Kalijodo ini berjalan dengan sangat baik.

2. Kerangka Teori

a. Komunikasi, Wacana, dan Pengetahuan

Stuart dalam Suriati dkk (2022), menjelaskan bahwa komunikasi berasal dari kata *communico* yang berarti berbagi. Lama kelamaan berkembang dalam bahasa latin menjadi *communis* yang berarti mengkonstruksi kebersamaan antara dua orang atau lebih. Selanjutnya ada Devito dalam Onong dimana ilmu komunikasi merupakan proses komunikasi diantara manusia (Suriati dkk,

2022). Selanjutnya Lasswell menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa bicara apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa, dan berefek apa? (Suriati dkk, 2022). Maka demikian secara umum komunikasi merupakan proses penyampaian pesan/makna dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media sehingga terjadi efek (Suriati dkk, 2022).

Dalam komunikasi terdapat beberapa perspektif yang dijelaskan dalam Suriati dkk (2022). Ada tiga perspektif yaitu, pertama ada perspektif sistem. Menekankan perspektif yang lebih membicarakan tentang peranan dan fungsi struktur organisasi dari semua komponen sistem komunikasi. Perspektif ini tidak pernah menurunkan peranan dan fungsi komponen dalam sistem komunikasi. Perspektif ini lebih fokus pada riset komunikasi yang mengarah ke sistem komunikasi dari suatu struktur tertentu. Kedua ada perspektif interpretif, lebih fokus pada penelitian yang membahas pada makna interaksi sosial. Penelitian yang menggunakan perspektif ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi sosial sebagai realitas sosial. Ketiga, ada perspektif kritis. Fokus pada studi yang bersifat kritis dan realitas sosial. Sebagai contoh relasi antara komunikasi dan kuasa atau komunikasi yang dipengaruhi oleh kuasa. Bisa juga proses komunikasi yang tergantung dengan struktur yang menimbulkan konflik komunikasi. Menariknya dalam perspektif kritis ini sangat berkaitan erat dengan kuasa, dimana teori wacana terdapat di dalamnya. Foucault juga berpendapat bahwa wacana ini sangat berkaitan erat dengan kuasa (Rusdiarti: 2008). Maka demikian wacana masuk dalam perspektif kritis. Namun perlu diketahui komunikasi dalam wacana sebenarnya tidak selalu tentang tekstual saja (Dhona: 2020).

Awalnya wacana didefinisikan sebagai argumen yang bermakna tertentu (Farrell: 2005). Wacana merujuk akan suatu domain umum seluruh pernyataan, maka dari itu wacana dapat diartikan seluruh ucapan dan pernyataan yang telah dikonstruksi dan memiliki arti serta efek tertentu (Foucault dalam Mills: 2005). Secara singkat dan sederhana Michel Foucault menjelaskan wacana sebagai sekumpulan pernyataan (Adiputra: 2021). Dalam pengertian umum wacana diartikan sebagai semua penggunaan bahasa dan tekstual (Adiputra: 2021). Namun perlu digaris bawahi dasar dari konsep wacana sendiri sebenarnya merupakan proses komunikasi teks, lisan, dan bentuk komunikasi lainnya yang diadaptasi dari lokasi tertentu/khusus.

Perlu menjadi catatan bahwa konsep wacana sebenarnya tidak selalu tentang tekstual saja (Dhona: 2020). Hal ini dikarenakan konsep wacana merupakan aktivitas komunikasi individu dalam berbagai bentuk yang tidak selalu tekstual. Mills mengungkapkan bahwa konsep wacana merupakan suatu aktivitas yang tersusun membentuk suatu objek/tindakan dan peristiwa yang menjadi topik dalam aktivitas/praktik tersebut. Sekilas dapat dilihat bahwa konsep wacana dibentuk dan ada melalui aktivitas yang membentuk tindakan atau peristiwa. Untuk itu wacana ini memiliki sifat khusus dimana di setiap lingkungan memiliki wacana sesuai yang dibentuk oleh praktik individu.

Selanjutnya masih dari Foucault mengatakan bahwa wacana sangat berkaitan erat dengan peraturan, dan aktivitas yang memproduksi statement yang memiliki makna dalam jangka waktu tertentu (Rusdiarti: 2008). Kuasa ada dan berhubungan pada objek-objek diskursif, yang mana dihasilkan wacana dan ada dalam wacana (Andersen: 2003). Foucault juga berpendapat bahwa wacana ini sangat berkaitan erat dengan kuasa (Rusdiarti: 2008). Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa kekuasaan adalah elemen penting atau elemen kunci dalam diskusi wacana (Mills: 2001). Jadi wacana dalam lingkungan sosial tertentu yang dapat memberikan statement dan memberikan makna sangat erat kaitannya dengan kuasa yang ada dalam lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini akan difokuskan wacana menurut Foucault dimana wacana merupakan kumpulan dari statement yang memiliki makna tertentu. Statement disini tidak melulu tentang kalimat/teks (Dhona: 2020). Jadi statement dapat berbentuk tindakan komunikasi non tekstual.

Pengetahuan merupakan apa yang didiskusikan oleh kelompok dalam praktik diskursif. Merupakan praktik yang di dalamnya terdapat aturan dan budaya yang akan membentuk suatu pengetahuan (Foucault: 2002). Jadi pengetahuan akan terbentuk dari praktik yang di dalamnya terdapat budaya yang mana pengetahuan akan terbentuk sesuai fakta di dalam praktik tersebut. Pengetahuan yang diungkapkan oleh Lubis dalam Siregar (2021) menegaskan bahwa pengetahuan tidak sama dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan bentuk pemikiran/gagasan/pemahaman yang dimiliki individu dalam memahami segala sesuatu yang ada dalam dunia. Sedangkan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan bagian dari pengetahuan itu sendiri.

Namun perlu diingat bahwa pengetahuan memiliki sifat khusus (Mchoul & Grace: 2002).

Selanjutnya Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan kekuasaan dimana keduanya bergerak memakai bahasa (Siregar: 2021). Selanjutnya Foucault menegaskan juga bahwa akibat dari pengetahuan dan kekuasaan yang saling memengaruhi maka, pengetahuan dapat mengkonstruksi kuasa. Ini sama dengan apa yang ditulis Adiputra (2021), dimana prinsip utama Foucault mengenai pengetahuan adalah kuasa. Selanjutnya Foucault juga berpendapat bahwa pengetahuan memiliki efek kuasa (Syarifuddin: 2018). Kuasa satu dengan yang lainnya memiliki hubungan satu sama lain, disinilah letak pengetahuan berada. Diantara tali penghubung yang ada antar kuasa. Kuasa akan selalu membangun pengetahuan dimanapun dia berada. Keduanya saling memengaruhi, karena pengetahuan tidak mungkin ada tanpa campur tangan kuasa dan begitu pula sebaliknya kuasa tidak mungkin ada tanpa campur tangan dari pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa tempat yang ada praktik kuasa merupakan tempat terjadinya pengetahuan pula.

b. Disiplin

Disiplin merupakan mekanisme kekuasaan yang mengatur individu dengan bertindak atas tubuh dengan cara yang berbeda (Kallman dan Dini: 2017). Disiplin dapat menempatkan individu dalam ruang yang berbeda, dengan menempatkan mereka dalam ruang tertentu maka dapat mengontrol individu sepanjang harinya. Disiplin menurut Foucault memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kapasitas tertentu di antara sekelompok individu (Ransom: 1997). Disiplin tidak bekerja dengan cara yang sama. Dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan kecenderungan individu yang dimanipulasi, jika dalam disiplin kapasitas dan kecenderungan justru akan diciptakan. Disiplin akan menanamkan kapasitas dan meningkatkan produktivitas individu dengan diiringi kepatuhan. Disiplin harus melibatkan penerapan jadwal penuh kegiatan jika ingin berhasil memaksa individu untuk mengubah perilaku dan menerapkan kebiasaan tertentu (Ransom: 1997).

Disiplin akan membentuk individu dengan persetujuan atau tidak dari para individu. Disiplin akan membentuk individu secara sadar maupun tidak sadar dengan sendirinya. Dalam bukunya *Discipline and Punish* Foucault

menjelaskan bahwa disiplin bukan penerapan paksaan langsung dari atas ke bawah, namun kekuasaan digunakan dengan cara yang membuat individu mengatur dirinya sendiri (Kallman dan Dini: 2017). Dalam *Discipline and Punish* dijelaskan bahwa, disiplin melalui pemantauan dan kontrol dapat membentuk seseorang sesuai dengan keinginannya. Memastikan individu sesuai dengan kriteria tertentu. Sebuah sistem yang mengumpulkan tentang subjeknya dapat memperoleh wawasan tertentu tentang perilaku individu dan alasan di baliknya, dimana nantinya akan membuat peraturan untuk mendorong individu mengatur dirinya sendiri. Terdapat empat mekanisme dalam disiplin menurut Foucault (1995):

1) The Art of Distribution

Disiplin kadang membutuhkan ruang, spesifikasi tempat yang heterogen bagi seluruh individu dan tertutup bagi diri mereka sendiri. Setiap individu memiliki tempatnya masing-masing. Ruang dalam disiplin cenderung dibagi menjadi banyak bagian karena ada tubuh yang didistribusikan. Individu harus menghilangkan efek dari distribusi yang tidak tepat, guna menetapkan apa yang berguna bagi individu. Maka dari itu Distribusi ruang merupakan peninggalan lokal, dimana peninggalan tersebut berdasarkan pemanfaatan suatu nilai kegunaan yang sesuai. Maka setelah itu akan membentuk dari tubuh untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam mekanisme ini disiplin adalah seni pangkat, Teknik untuk transformasi pengaturan. Dimana individualisasi tubuh dengan ruang yang tidak memberikan posisi tetap, tetapi akan menyebarkan dan mengedarkan dalam jaringan hubungan. Disiplin akan memberikan arahan pada tubuh pada suatu hubungan bukan pada sesuatu yang sesuai.

2) The Control of Activity

Dalam kontrol aktivitas ada tiga metode untuk mengatur yaitu menetapkan ritme, memaksa pekerjaan tertentu, dan mengatur siklus pengulangan. Sebagai contoh dapat ditemukan di sekolah dan rumah sakit. Disiplin-disiplin baru tidak mengalami kesulitan dalam bentuk-bentuk lama. Dalam melakukan kontrol aktivitas ada pula teknik yang dapat digunakan seperti *timetable*, yang mana para individu dapat mengerjakan sebuah tujuan

secara bersama dalam kurun satu waktu. Selanjutnya seperti bentuk aktivitas organisasi/kelompok di kontrol, individu dilatih dan diarahkan untuk melakukan suatu hal yang sama. Maka dalam kontrol, institusi seperti pemerintah, sekolah, dan lainnya membuat regulasi untuk aktivitas individu. Kontrol aktivitas ini dipaksakan guna memberikan perilaku yang lebih baik. Maka peraturan yang ada merupakan hukum konstruksi operasi.

3) The Organization of Geneses

Tubuh dapat memiliki kemampuan lebih. Kemampuan lebih dapat diraih dengan cara melatihnya. Melatihnya dapat dengan cara menambah aktivitas guna menambah waktu yang dilakukan tubuh. Dalam menambah aktivitas tentunya tubuh akan melakukan penyesuaian yang mengarah pada meningkatkannya kemampuan lebih tubuh. Penyesuaian dapat dikatakan sebagai latihan untuk tubuh. Bisa dengan cara membagi durasi menjadi segmen-segmen yang berurutan dan harus berakhir pada waktu tertentu. Apabila tubuh sudah dapat mengatur mandiri waktu dan tambahan aktivitas maka individu mendapatkan keuntungan seperti tubuh sudah memiliki kemampuan lebih dalam mengatur penggunaan waktu.

4) The Composition of Forces

Tubuh individu menjadi elemen yang dapat ditempatkan, digerakan, diartikulasikan kepada orang lain. Kekuatannya bukan lagi hal yang utama bagi tubuh, melainkan tempat yang ditempatinya. Sebagai contoh prajurit yang tubuhnya dilatih akan berfungsi bagian demi bagian untuk operasi tertentu, pada gilirannya membentuk elemen dalam mekanisme di tingkat lain. Kombinasi kekuatan ini membutuhkan sistem komando yang tepat. Prajurit tadi akan membentuk suatu kekuatan guna membagi kekuatan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dan juga aktivitas yang mengkonstruksi prajurit dalam keterampilan fisik. Prajurit dikonstruksi sebagai mesin yang dapat beraktivitas secara terus menerus, melakukan perintah, dan harus mudah dalam melakukan adaptasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif akan membentuk penelitian yang menggunakan latar belakang natural guna menjelaskan fenomena yang diteliti (Denzin dan Lincoln dalam Anggito & Setiawan: 2018). Selanjutnya penjelasan dalam penelitian kualitatif akan digambarkan secara naratif deskriptif berupa kegiatan dan dampak yang ada dalam kehidupan individu (Erickson: 1968, dalam Denzin & Lincoln: 1994). Jadi penelitian kualitatif ini akan meneliti mengenai Peristiwa/kejadian yang ada dalam kehidupan sosial, dimana dilihat dari kondisi yang *real* sesuai apa yang terjadi di tempat kejadian peristiwa.

2. Pendekatan Penelitian

Analisis wacana merupakan teori analisis tentang bahasa (bahasa visual, tubuh, dan lainnya) sebagai salah satu bentuk elemen/momen dari kehidupan sosial (Wodak & Meyer: 2001). Dalam analisis ini cara menganalisis bahasa akan lebih luas dari proses sosial. Analisis wacana kritis memasukan perspektif bahasa sebagai elemen dari proses sosial. Analisis wacana kritis mencakup segala bentuk pembuatan makna, gambar visual, bahasa tubuh, dan bahasa. Analisis wacana kritis merupakan hubungan antara dialektis dan simiosis (termasuk bahasa) dan elemen lain dari praktik sosial. Analisis wacana melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, dengan bagaimana semiosis muncul dalam proses perubahan, dan pergeseran hubungan antara semiosis dan elemen sosial dalam kehidupan sosial. Semiosis digambarkan menjadi aktivitas sosial, representasi, dan pertunjukan.

3. Narasumber/Informan Penelitian

Narasumber/informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima Malioboro yang terdampak relokasi. Adapun kriteria lainnya untuk narasumber di penelitian ini adalah para PKL yang sebelumnya sudah berjualan di Jalan/Area Malioboro lalu direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2. Hal ini dikarenakan peneliti harus mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pengorganisasian waktu dan ruang, perilaku dan aktivitas, sistem pengawasan PKL dalam kasus relokasi. Maka dari itu narasumber/informan yang tepat dalam penelitian ini yaitu para PKL Malioboro yang terdampak relokasi karena dapat memberikan data dan gambaran yang jelas.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam karya ini akan dilakukan secara langsung. Dimana Nawawi menegaskan bahwa observasi langsung yaitu proses metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan menulis apa saja peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti. Metode ini dilakukan guna mendapatkan data dalam menyelesaikan/memecahkan masalah dalam penelitian. Kelebihan metode ini dapat memberikan data yang akurat dan bisa dibuktikan langsung di lapangan (Samsu: 2017).

Bailey membagi observasi menjadi tiga jenis (Samsu: 2017). Pertama, observasi partisipan yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan dan ambil bagian dalam proses observasi. Kedua, observasi sistematis/observasi berstruktur yang dilakukan dengan struktur yang dikelompokkan dan dikategorikan dimana di dalamnya berisi apa yang harus dan diperlukan penulis dalam memecahkan serta menyelesaikan masalah. Ketiga, observasi eksperimental yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan melihat perubahan yang terjadi pada variabel dari peristiwa sebagai sebuah eksperimen.

Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan observasi partisipan. Dimana peneliti akan melihat langsung kejadian atau fenomena apa saja yang ada di lapangan. Dengan tujuan untuk mendapat data yang lebih akurat, lengkap dan mendetail.

b. Wawancara

Wawancara menganut definisi dari Arikunto yang mana merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog antara peneliti dengan narasumber penelitian (Samsu: 2017). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti guna menarik informasi dan data yang bagi peneliti dapat digunakan sebagai pemecah masalah yang sudah tertulis dalam rumusan masalah. Metode wawancara dapat memberikan data yang lebih rinci dan mendalam daripada observasi. Kelebihan lainnya yaitu wawancara dapat mengetahui apa yang dipikirkan dan dipercaya oleh narasumber.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Yang menjadi narasumber atau sumber informasi dalam wawancara disini yaitu para PKL Malioboro yang terdampak relokasi. Wawancara dilakukan untuk menemukan informasi yang dapat menjawab

pertanyaan dalam penelitian. Hasil wawancara akan dikumpulkan berupa opini dari para PKL yang menjadi sumber data tambahan untuk memecahkan masalah

Narasumber/informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima Malioboro yang terdampak relokasi. Adapun kriteria lainnya untuk narasumber di penelitian ini adalah para PKL yang sebelumnya sudah berjualan di Jalan/Area Malioboro lalu direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2. Jadi narasumber dapat memberikan data yang jelas mengenai relokasi PKL Malioboro.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dari sumber-sumber yang berupa buku dan jurnal atau yang terkait (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Metode ini sangat berkaitan dengan pengumpulan data berupa buku dan pustaka lainnya. Proses studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencari informasi/data yang mendukung penelitian (terutama buku sejarah mengenai Kerajaan Mataram Islam), mencatat dan menulis bagian penting yang berkaitan dengan penelitian, mengolah dan mengelompokkan data yang sudah dikumpulkan, lalu menyusun hasil dari pengumpulan data berupa deskripsi sejarah yang berkaitan dan mendukung penelitian.

5. Analisa Data

Karya ini akan menerapkan teknik *Flow Chart Analysis* milik Miles bersama Huberman dalam Samsu (2017):

a. Reduksi Data

Dalam proses ini akan dilakukan analisis lalu memilah, memfokuskan dan ditransformasikan dalam data mentah setelah pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Reduksi data akan menganalisis secara rinci dan fokus agar dapat memilah data yang dapat membantu menjawab pertanyaan dan membuang data yang tidak penting (Ibid dalam Samsu, 2017). Maka dalam reduksi data seluruh data yang diperoleh akan dirangkum, dipilah, dan difokuskan sesuai dengan tema penelitian agar membentuk pola yang diinginkan dalam penelitian.

b. Sajian/Tampilan Data

Setelah membentuk pola maka akan dilakukan sajian data. Pola yang sudah terbentuk akan dikonstruksi sehingga dapat memudahkan penulis dalam memahami

peristiwa apa yang terjadi di lapangan (Samsu: 2017). Tampilan data akan berbentuk teks narasi deskriptif. Fokusnya sajian data akan memberikan gambaran dari data yang sudah dikumpulkan dan menjadi pola serta relasinya dengan topik penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan disini berguna dalam memutuskan dan menindaklanjuti apa saja yang bermakna dalam data yang sudah dirangkai dan di dapat saat di lapangan, serta memutuskan apa relasinya dan sebab akibat yang melatarbelakangi fenomena (Milles & Hubeerman dalam Samsu, 2017). Kesimpulan yang didukung dengan data yang valid sudah dapat dipercaya hasilnya.

6. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi dan wawancara yaitu enam bulan. Dalam waktu enam bulan peneliti akan mengumpulkan data yang dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Lokasi atau tempat penelitian yaitu Teras Malioboro 1 dan 2. Teras Malioboro 1 berlokasi pada Jl Margo Mulyo, daerah Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Untuk Teras Malioboro 2 terletak pada Jalan Malioboro No. 56, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua tempat tersebut memiliki akses yang sudah mumpuni dan kedua tempat tersebut masih di lingkungan yang sama dan saling berdekatan yaitu di Daerah Malioboro.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam riset ini yang menjadi objek penelitian adalah beberapa PKL Malioboro yang terdampak relokasi. Kemunculan istilah “pedagang kaki lima” bisa dilihat pada saat awal penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, mereka membuat regulasi di mana setiap jalan raya harus membuat akses untuk pejalan kaki yang disebut trotoar. Lebar dari akses pejalan kaki tersebut adalah lima kaki kurang lebih satu setengah meter. Setelah Indonesia merdeka trotoar tadi digunakan para pedagang untuk berjualan. Pada awalnya disebut “pedagang emperan”, namun seiring berjalannya waktu disebut pedagang kaki lima, merujuk pada lebar trotoar untuk berdagang (Permadi: 2007).

Namun di sisi lain tokoh Indonesianis William Liddle berpendapat bahwa aturan lebar trotoar lima kaki berasal dari bahasa Inggris, *five foot* (Permadi: 2007). Liddle berpendapat demikian karena Inggris pernah mengambil alih kekuasaan Belanda pada 1811 masa penjajahan. Tokoh yang mencetuskan peraturan mengenai trotoar adalah Gubernur Jenderal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Apabila membuka Kamus Indonesia yang dibuat oleh WJS Poerwadarminta (1976), arti kaki lima itu adalah lantai (tangga) di muka pintu atau berada di tepi jalan, dan diberi atap, untuk menghubungkan rumah (Permadi: 2007). Pengertian di atas lebih mengarah kepada pengertian trotoar lima kaki. Perlu diketahui dalam pengertian ini bisa juga didefinisikan sebagai tepi toko. Hal ini dikarenakan PKL berjualan selain di trotoar kadang ada pula yang di tepi toko.

PKL kebanyakan memilih tempat berjualan di tempat yang ramai. Seperti di tempat wisata, stasiun, halte, perempatan, halte, dan pasar. PKL ada yang menggunakan gerobak dengan roda, ada pula yang digendong dagangannya, ada pula yang menggunakan lapak memanfaatkan terpal dan kayu untuk membuat lapaknya. Barang yang dijual oleh PKL juga bermacam-macam jenisnya. Ada yang menjual makanan dan minuman, ada yang menjual mainan, pakaian, aksesoris, dan sebagainya.

PKL ada dan hadir karena beberapa faktor (Permadi: 2007). Pertama ada faktor ekonomi, krisis moneter/keuangan yang terjadi tahun 1997-1999 menyebabkan banyak pengangguran di berbagai daerah. Kebanyakan dari pengangguran tersebut memilih untuk menjadi PKL. Kedua, lapangan pekerjaan yang masih sedikit, mereka memilih

PKL karena tidak perlu modal yang besar, dan terkadang tidak perlu tempat seperti kios dalam berjualan. Ketiga, urbanisasi, dimana para pendatang merantau ke kota tanpa banyak persiapan membuat mereka memilih menjadi PKL.

Sekarang ini sudah sangat banyak terdapat PKL yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya di kota-kota besar di Indonesia yang PKLnya sudah menghiasi di tempat-tempat tertentu yang ada di kota. Yogyakarta, Malioboro menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan betapa banyaknya PKL di kota besar di Indonesia.

Awal mula PKL berjualan di Malioboro ketika Abdi Dalem Patih Danureja membuka usaha di Jalan Malioboro pada abad ke-18. Patih Danureja memberikan izin berdagang kepada para Abdi Dalem di area Malioboro. PKL Malioboro muncul karena paham masyarakat yang melihat Malioboro sebagai pusat perekonomian atau pasar, maka demikian siapa saja yang ada datang untuk berjualan. Dikarenakan semua belum tentu memiliki toko maka mereka membuat lapak kecil di sejumlah ruang yang ada di area Malioboro (<https://jateng.liputan6.com>, 27 Januari 2022).

PKL Malioboro yang berdagang di area Malioboro sangat banyak sekitar 2000 pedagang (travel.kompas.com, 20 Januari 2022). Banyaknya PKL yang ada di area Malioboro membuat pemerintah harus melakukan langkah tertentu dalam menertibkannya. Diatur dalam peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro. Baru-baru ini pemerintah melakukan upaya untuk menertibkan PKL area Malioboro dengan melakukan relokasi.

Relokasi dilakukan tentunya dengan alasan tersendiri dari pemerintah. Namun disisi lain banyak dari PKL yang pro dan kontra mengenai pemindahan tempat dagang mereka. PKL Malioboro tentunya sudah melakukan cara untuk berunding dengan pemerintah dan pihak terkait relokasi yang dilakukan.

PKL dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Untungnya bagi para PKL yaitu mereka diberikan lahan tempat yang baru untuk berdagang di Teras Malioboro. Bagi mereka yang sebelum direlokasi belum memiliki lahan akan merasa diuntungkan dalam relokasi ini. Untuk yang sudah memiliki lahan, terkadang ada yang mengeluh dengan yang baru karena kurang memadai, sempit, dan masalah lainnya yang ada di Teras Malioboro.

Menariknya yaitu proses relokasi ini menjadi upaya yang dilakukan pemerintah guna mendisiplinkan para PKL Malioboro. Riset ini akan membahas lebih dalam

mengenai apa yang sebenarnya ingin didisiplinkan pemerintah kepada para PKL Malioboro. Tentunya akan dilihat pula kuasa Sultan yang berperan mendisiplinkan PKL dengan proses relokasi. Maka demikian objek penelitian pada riset ini yaitu PKL Malioboro yang terletak di Teras Malioboro 1 dan 2 yang terdampak relokasi. Dengan kata lain PKL yang menjadi objek penelitian yang dulunya pernah berdagang di area Malioboro dan mengalami proses relokasi, selanjutnya ditempatkan di Teras Malioboro 1 dan 2. Para PKL Malioboro yang terdampak relokasi menjadi objek penelitian yang paling cocok karena mereka mengalami proses berdagang sebelum dan sesudah relokasi, serta mereka sudah mengalami masa yang lama dalam berdagang di area Malioboro. Tentunya data yang akan diperoleh akan lebih akurat jika objek penelitian yaitu PKL Malioboro terdampak relokasi.

B. Deskripsi Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Teras Malioboro 1 dan 2. Teras Malioboro 1 terletak pada bekas Gedung Bioskop Indra, di seberang Pasar Beringharjo. Alamatnya yaitu Jl Margo Mulyo, Daerah Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Teras Malioboro 2 terletak pada bekas Gedung Kantor Dinas Pariwisata DIY, utara Kantor DPRD DIY. Alamatnya yaitu Jalan Malioboro No. 56, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua lokasi penelitian terletak berdekatan, masih dalam lingkup area Malioboro, Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan kota yang dikenal dengan wisatanya. Malioboro menjadi salah satu destinasi utama bagi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Ciri khas daerah ini menjadikan Malioboro sebagai opsi penting dalam berwisata ke Yogyakarta. Ditambah lagi oleh-oleh yang dijual di daerah Malioboro sangat banyak dan lengkap. Malioboro sebagai pusat perdagangan dan tempat wisata membuat para PKL berkumpul di daerah tersebut.

Malioboro juga merupakan salah satu tempat yang dilewati oleh sumbu imajiner. Akibatnya pemerintah melakukan relokasi para PKL di area Malioboro agar trotoar yang menjadi akses jalan menjadi tempat pelayanan yang memadai bagi para pejalan kaki.

Dalam menyelesaikan karya ini, peneliti melakukan proses wawancara pada tanggal 1 November 2022 di Teras Malioboro 1 dan 2. Peneliti melakukan wawancara satu hari penuh dengan informan, namun secara bergantian. Untuk proses transkrip wawancara sendiri dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini merupakan para PKL yang ada di Teras Malioboro 1 dan 2. Untuk menghormati dan permintaan dari narasumber dalam penelitian ini nama hanya akan menggunakan inisial saja. Narasumber berjumlah tiga orang, berikut daftarnya:

1. Bapak A (42 tahun)

Merupakan PKL yang berasal dari Jogja, tepatnya di timur Kali Code. Beliau pedagang yang menjual kaos dan pakaian seperti blangkon, lurik dll. Beliau hanya melanjutkan jualan yang diwariskan oleh orang tuanya, dan berdagang merupakan pekerjaan satu-satunya dari beliau. Beliau sudah berjualan sejak di Jalan Malioboro dan dipindah ke Teras Malioboro 2.

2. Bapak W (50 tahun)

Merupakan PKL asli dari Gunung Kidul, namun bertempat tinggal di Pringgokusuman, Gedung Tengen, Yogyakarta. Beliau merupakan pedagang yang merantau menjual makanan seperti nasi ayam, ikan, bakso, dan lainnya. beliau berdagang dan merantau karena terdapat kendala dalam ekonomi di keluarganya. Beliau sudah berjualan di area Malioboro tepatnya di depan gedung DPR sejak tahun 1989 hingga dipindah ke Teras Malioboro 2.

3. Ibu M (51 tahun)

Merupakan PKL yang berasal dari Gunung Kidul, namun mengkontrak rumah di daerah Gondomanan, Yogyakarta. Sudah berjualan sejak tahun 1992 dari di daerah Malioboro tepatnya di depan kantor gubernur (seberang kantor gubernur) hingga dipindah ke Teras Malioboro 1. Beliau menjual aneka oleh-oleh seperti hiasan dari kayu, besi, serta menjual kaos, pakaian dan lainnya.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gagasan Foucault mengenai disiplin bertujuan untuk menciptakan kapasitas tertentu dalam suatu kelompok individu (Ransom: 1997). Disiplin dapat mengontrol individu jika diletakkan dalam ruang tertentu. Disiplin akan meningkatkan produktivitas dari sebuah individu diiringi dengan kepatuhan. Foucault memberikan penjelasan bahwa disiplin bukan penerapan paksaan secara langsung dari atas ke bawah, namun kekuasaan dimanfaatkan agar para individu dapat mengatur dirinya sendiri. Foucault juga menerangkan bahwa melalui pemantauan dan kontrol akan membentuk individu sesuai keinginannya. Dalam disiplin terdapat empat mekanisme di dalamnya menurut Michel Foucault yaitu *The Art of Distribution*, *The Control of Activity*, *The Organization of Geneses*, dan *The Composition of Forces*. Di bawah ini peneliti akan menjabarkan bagaimana disiplin yang ada PKL Malioboro menggunakan empat mekanisme yang disebutkan oleh Michel Foucault. Namun dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai peran Sultan dalam disiplin di sejarah kraton Jawa. Untuk melihat disiplin yang terjadi saat pemindahan PKL peneliti juga melihat sejarah saat masa Mataram Kuno guna menambah data dan referensi sejarah untuk melihat disiplin yang terjadi di kraton Jawa.

3.1 Temuan

3.1.1 Sultan dalam Disiplin Ruang di Keraton Jawa

Sebelum membahas mengenai Sultan dalam disiplin ruang di Keraton Jawa, akan dijelaskan lebih dulu mengenai relasi Sultan dengan rakyatnya, kedudukan raja, bagaimana ruang dilihat di masyarakat Jawa, serta pembagian ruang kerajaan di Jawa. Maka dalam sub bab ini akan dibagi pembahasannya melalui beberapa sub-bab.

a. Relasi Kawula-Gusti

Pertama akan dibahas mengenai relasi antara raja dengan rakyatnya. Relasi antara raja dan rakyat dalam kerajaan Jawa sering disebut dengan konsep *Kawula-Gusti* (Hamba dan Tuan). Dalam budaya kehidupan Jawa hubungan antara hamba dan tuan merupakan ikatan yang pribadi. Hubungan ini seperti halnya hubungan kasih sayang yang ada dalam keluarga. Hubungan seperti ini diperlihatkan orang Jawa dengan cara menyapa orang asing dengan panggilan *ki-sanak* atau *saderek*, yang berarti kerabat (Moertono, 2017).

Konsep *kawula-gusti* dianggap mistik (kebatinan) dan dianggap wadi (sangat rahasia) oleh orang Jawa. Mereka meyakini hanya orang tertentu yang dapat memperoleh relasi ini. Dalam

pandangan mistik Jawa, kata-kata *jumbuhing kawula-gusti* (menyatunya hamba dan tuan), memperlihatkan tujuan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, yang dimaksud adalah tercapainya “kesatuan” (*manunggal*) dengan Tuhan. Konsep *kawula-gusti* menggambarkan status manusia yang paling rendah dan paling tinggi dalam masyarakat. Sangat penting diketahui kesatuan antara hamba dan tuan ada karena sebuah ikatan dan sifat tertentu, yang sama pada manusia dan tuhan. Sifat ini dinamakan *suksma* (sukma) oleh masyarakat Jawa (Moertono, 2017).

Perlu diketahui bahwa dimana ikatan yang mempersatukan antara raja dan rakyat tidak diperbolehkan melanggar atau melebihi garis pemisah yang berdasarkan pangkat dan kelahiran. Hal ini nampak pada peraturan yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Seperti halnya mengatur bahasa, pakaian, dan cara penghormatan. Maka dari itu konsep *kawula-gusti* membuat proses komunikasi yang terdapat antara raja dan rakyat menjadi sebuah seni. Seni yang memperlihatkan perhatian seperti dalam keluarga (Moertono, 2017).

Konsep *kawula-gusti* juga digambarkan masyarakat Jawa dengan sebuah kepercayaan yang tidak goyah akan hal-hal yang memang sudah ditakdirkan. Ini dinyatakan dalam istilah *pinesti* (ditentukan) dan *tinitah* (ditakdirkan). Terdapat dua lapisan dalam kehidupan Jawa yaitu *wong cilik* (orang biasa) dan *penggede* (penguasa). Konsep ini tidak dilihat dari faktor ekonominya, namun dilihat dari segi tuan dan hamba, serta tempat dalam masyarakat seperti posisi sosial dalam masyarakat. Maka demikian hak dan kewajiban keduanya dianggap sudah ditakdirkan (Moertono, 2017).

Konsep *kawula-gusti* menggambarkan saling ketergantungan antar dua unsur yang berbeda. Namun kedua unsur tersebut tidak terpisahkan. Sama halnya dengan keris. Antara sarung (*warangka*) dan matanya (*curiga*) dilihat dari penafsiran yang bersifat mistik. Sarung keris digambarkan dengan rakyat, mata keris digambarkan dengan raja. Hubungannya yaitu sarung melindungi matanya dari kerusakan, sebaliknya mata melindungi sarung agar tidak dicuri atau hilang. Raja menggambarkan mata keris, maka dari itu mata raja harus layak dengan kriteria apapun bagi rakyatnya (Moertono, 2017).

Digambarkan pula hubungan antara raja dan rakyat dari sebuah cincin. Masyarakat Jawa menggambarkan raja sebagai *sesotya* (batu permata) dan rakyat sebagai embanan (ikatan yang ada di cincin). Relasi antara raja dan rakyat sama pentingnya, yang berbeda antara keduanya berada pada fungsinya daripada segi nilai (Moertono, 2017).

Gambaran lain yang diperlihatkan mengenai relasi raja dan rakyat Jawa ditunjukkan melalui kata *momongan*. *Momongan* berasal dari kata *momong*, artinya yaitu mengasuh dan membimbing dengan kasih. Dalam *momong* juga mengandung sifat waspada dan serta bujukan halus. Dalam *momong* ditegaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar bagi yang menjaga (pamong/raja), daripada yang dijaga. Tanggungjawab ini akan ada seterusnya walaupun yang kecil sudah menjadi dewasa. Ditekankan pula bahwa peran sang raja lebih tinggi dari hamba yang diiringi dengan rasa syukur dan patuh (Moertono, 2017).

Suatu pemikiran dari masyarakat Jawa mengenai relasi antara raja dan rakyat dituliskan dalam tiga konsep pokok. Pertama, model komunikasi sosial yang baku berbentuk perasaan saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Kedua, karena takdir telah menetapkan kedudukan manusia seperti abdi dan tuan maka manusia tidak memiliki opsi lain selain yang sudah ditakdirkan. Akibatnya konsep ini membentuk praktik pemerintahan di Jawa. Ketiga, raja memperlakukan rakyatnya seperti orang tua merawat anaknya sendiri. Ini dikarenakan takdir yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka demikian raja harus memiliki sikap menjaga, di sisi lain rakyat memiliki sikap tulus dari hati dalam pengabdianya. Sikap menjaga raja terutama perlu dilakukan untuk rakyat dan semua yang berada di dalam wilayah kerajaannya (Moertono, 2017).

b. Kedudukan Raja

Kedua akan dibahas mengenai kedudukan raja, dimana raja dipandang sebagai peran mikrokosmos dalam kehidupan bernegara (Moertono, 2017). Pandangan alam terbagi menjadi dua yaitu mikrokosmos dunia dan manusia, serta makrokosmos dunia dengan supra manusia. Dalam pandangan ini berisi dua faktor penting bagi masyarakat Jawa dalam bernegara, pertama adanya keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, kedua terdapat pengaruh timbal balik antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Kedua faktor ini memengaruhi bahwa ketertiban yang ada dianggap sebagai peraturan yang teliti dan ketat dan mengikuti perubahan musim yang tiada hentinya. Maka demikian konsep seperti di atas menimbulkan sikap-sikap tradisional dan konservatif (Moertono, 2017).

Selanjutnya dalam sejarah mataram islam kedudukan Raja ini sebagai kalipatullah atau yang dapat dikatakan sebagai wali Tuhan di dunia. Orang pertama yang mendapat gelar ini yaitu Amangkurat IV (1719-1724). Nama lengkap serta gelarnya yaitu Prabu Mangku-Rat Senapati Ingalaga Ngabdu Rahman Sayidin Panatagama Kalipatullah (Moertono, 2017). Maka dari itu orang Jawa percaya bahwa Sultan/raja menjadi satu-satunya perantara yang

menghubungkan antara mikrokosmos manusia dengan makrokosmos dewa, dimana ini dikatakan oleh Pangeran Puger ketika Cakraningrat mendesaknya agar menentang perintahnya, Amangkurat III (Moertono, 2017):

“...bila ada yang berani menentang Sultan/raja, nasib malang akan menimpanya, karena raja adalah warana Allah”.

Dalam bahasa sastra, arti kata *warana* adalah “wakil” dan “utusan” secara harfiahnya yaitu “layar pemisah”. Dalam pemikiran ini raja sebagai layar, yang mana jikalau manusia ingin berhubungan dengan Tuhan harus melalui raja, sebaliknya juga sama raja harus dilalui Tuhan jika ingin berurusan dengan manusia. Dikarenakan raja sebagai penghubung tunggal antara manusia dan Tuhan, maka tidaklah aneh ketika raja mengeluarkan keputusan tidak dapat ditentang atau diperdebatkan dan harus diketahui bahwa kekuasaannya tanpa batas. Kembali lagi konsep ini dikarenakan semua keputusan raja dianggap sebagai kehendak Tuhan (Moertono, 2017). Ini juga sejalan dengan yang ada di Anderson (1990), dimana dalam tulisan sejarah-sejarah Jawa raja-raja sebagai titisan dewa ini menandakan adanya penyerapan kuasa dari luar ke dalam diri.

Berbicara mengenai kekuasaan Sultan yang tanpa batas, tradisi pemikiran Jawa mengenai konsep sentral dalam perspektif Jawa adalah relasi langsung antara keadaan batin seseorang dengan kemampuannya untuk mengontrol lingkungan (Anderson, 1990). Kemampuan yang paling terlihat dari orang yang memiliki kuasa yaitu kemampuannya untuk menyerap kuasa dari luar dan memusatkan kepada dirinya terhadap aspek-aspek yang ada di dirinya tanpa berlawanan.

Gambaran lain dari kedudukan raja juga dijelaskan dalam konsep *wewenang murba wisesa* (Moertono, 2017). Disini juga dijelaskan bahwa kedudukan Sultan/raja dianggap sebagai pencerminan kedudukan Tuhan. Tuhan dianggap sebagai *Murbawisesa* atau Penguasa Tertinggi. Dalam konsep kelas sosial raja diletakkan di bagian yang jauh dari jangkauan orang biasa. Maka dari itu tugas pokok raja sebenarnya harus menata dunianya yaitu negara. Tidak hanya dalam struktur namun juga dalam fungsinya. Maka nama Sultan/raja Jawa terdapat Paku dari Pakubuwono dan Hamengku dari Hamengku Buwono (memangku/memelihara).

Selanjutnya kedudukan raja dalam politik adalah menjaga ketertiban (Moertono, 2017). Raja menjaga agar tidak terjadi gangguan-gangguan dan menjaga ketertiban. Konsep ini mengusung ungkapan *njaga tata tentreming praja* yang berarti menjaga ketertiban dan kepentingan negara. Maka dari itu raja harus menjaga seluruh wilayah kerajaannya serta

mempertahankan dan memelihara di seluruh bagian ruang di kerajaannya. Ini sejalan dengan tulisan Anderson (1990) dimana masyarakat Jawa cenderung percaya bahwa jikalau ia/raja masih memiliki kuasa maka kekacauan tidak akan timbul. Dikarenakan masyarakat Jawa percaya bahwa kekacauan muncul akibat terpisah-pisahannya kuasa dalam negara.

c. Ruang digambarkan dalam Masyarakat Jawa

Baru saja sudah dibahas mengenai ruang yang harus dijaga ketertibannya di atas. Selanjutnya masuk ke bagian tiga dimana masyarakat Jawa memiliki keunikan dalam membicarakan ruang. Terdapat hal unik dengan cara ruang ditampilkan dalam sejarah Keraton Yogyakarta. Dalam masyarakat Jawa raja ini dianggap sebagai pusat alam semesta dalam pengetahuan budha. Raja merupakan pusat suatu wilayah dan merupakan bagian dari wilayah tersebut (Dhona: 2014). Dhona juga memberikan contoh kasus dalam tesisnya dimana kejadian yang melibatkan Ayutthya dan Majapahit abad 14, kejadian tersebut terjadi hanya dikarenakan kehendak raja yang dianggap sebagai titik pusat kerajaan terjajah tersebut, akan menyembah siapa. Ini juga ditegaskan oleh Anderson (1990) dimana konsep Jawa mengenai kekuasaan memerlukan satu pusat. Dimana pusat tersebut memiliki karakter menyerap, dimana titik pusat ini ada dalam diri sang penguasa.

Penguasa sebagai titik pusat tidak hanya diberlakukan di Jawa. Funan salah satu daerah di Asia Tenggara, bukan merupakan nama daerah. Funan merupakan nama gelar pemegang kekuasaan yang memiliki arti raja gunung (Dhona: 2014). Contoh ini menguatkan alasan bahwa raja dapat dianggap sebagai pusat pemerintahan. Seperti halnya yang terjadi dalam kerajaan Mataram.

Ketika penguasa/raja memiliki hubungan dengan dewa atau tuhan, dapat dikatakan raja memiliki sifat maha hadir atau selalu ada dimanapun. Untuk masalah wilayah sendiri, selagi dia merupakan rakyat suatu wilayah maka dirinya akan selalu terikat dengan rajanya, entah dimanapun dirinya berada. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara kawula dan gusti merupakan wilayah itu sendiri. Maka batas dari sebuah wilayah yaitu raja itu sendiri.

Hal ini dikarenakan wilayah kerajaan terletak dalam hubungan antara kawula dan gusti. Kekuasaan sebenarnya diletakkan dalam rakyatnya bukan teritorinya. Rakyat memiliki peran penting dalam kekuasaan ini. Raja sebagai pembatas dari teritori, namun kekuasaan juga ada dalam diri rakyatnya.

Maka dari itu ruang digambarkan oleh masyarakat Jawa dengan cara yang unik. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya dimana raja merupakan bagian penghubung antara manusia dan Tuhan. Dalam konsep masyarakat Jawa Raja dianggap sebagai titik pusat kerajaan memanglah wajar adanya melihat konsep mikrokosmos dan makrokosmos. Keunikan lainnya dimana raja dijadikan sebagai pembatas teritori yang berarti wilayah kerajaan ini tidak selalu tetap tergantung raja dan rakyatnya berada.

d. Pembagian Ruang dalam Kerajaan Jawa

Membicarakan mengenai wilayah tentunya akan dibahas pula pembagian ruang dalam kerajaan Jawa agar lebih jelasnya. Bagian keempat akan menjelaskan pembagian wilayah Jawa yang dibagi ke dalam empat wilayah. Dimana sebelumnya daerah Mataram asli sesungguhnya merupakan hadiah dari Sultan Adiwijaya dari Pajang kepada Kyageng Pemanahan, pendiri bangsa Mataram. Daerah tersebut awalnya masih berbentuk hutan belantara. Sementara Pati yang diberikan Sultan kepada Ki Panjawi, berbentuk “negari”, sebuah kota yang di dalamnya sudah berpenduduk. Wilayah kerajaan islam dibagi ke dalam empat wilayah yaitu Kuthagara atau Kutha Negara, Nagaragung, Mancanagara, dan Pasisir (Supriyono: 2009). Kutha Negara merupakan wilayah pusat atau inti dari kerajaan Mataram. Ini sejalan dengan apa yang ditulis Suromihardjo (2000), bahwa ciri kota pada masa lampau ada di dekat pusat pemerintahan. Dimana pemerintahan tersebut memberikan perlindungan kepada penduduk yang ada di kota tersebut. Tidak hanya itu dijelaskan pula bahwa kota-kota pada masa lampau berpusat ke keraton, tempat tinggal penguasa. Dalam wilayah Kutha Negara ini pula terletak kerajaan atau keraton yang juga menjadi tempat tinggal raja/penguasa dengan keluarganya, serta para pejabat tinggi kerajaan. Kutha Negara juga menjadi wilayah pusat dan menjadi ibukota dari kerajaan Mataram. Dengan demikian wilayah ini merupakan tempat raja beserta pejabat pemerintahannya melaksanakan dan mengendalikan pemerintahan yang ada.

Selanjutnya terdapat wilayah Nagaragung. Merupakan daerah besar, yang mana daerah ini terletak di sekitar Kutha Negara. Wilayah ini juga masih terletak dalam inti kerajaan Mataram (Moertono: 1985). Dalam wilayah Nagaragung terdapat tanah lungguh (tanah gaji) milik bangsawan dan pejabat tinggi keraton yang tinggal dalam wilayah ini. Daerah yang masuk dalam kategori Nagaragung yaitu Mataram (kurang lebih hampir sama dengan Yogyakarta yang sekarang ini), Pajang yang lokasinya ada di sebelah Barat Daya Surakarta, Sukowati lokasinya di sebelah Timur Laut Surakarta, Kedu, Bagelen, dan Siti Gede atau Bumi Ageng

yang lokasinya berada di sebelah Barat Laut Surakarta dan di sebelah Barat Daya Semarang, batasnya kira-kira di antara Ungaran dan Kedung Jati.

Selanjutnya terdapat wilayah Mancanagara. Wilayah ini dibagi menjadi Mancanagara Wetan (Timur) dan Mancanagara Kulon (Barat). Dalam wilayah ini tidak terdapat tanah lungguh pejabat tinggi dan bangsawan keraton seperti di daerah Nagragung. Wilayah Mancanagara Kulon terdiri dari, Banyumas dan pasir (Purwakerta), Ngayah, Kalibeber, Modern (Timur Banyumas), Roma (Karanganyar), Karangbolong, Warah, Tersana, Karencang, Lebalsiyu, Balapulung, Bobotsari, Kartanegara, Bentar dan Dayaluhur. Sedangkan Mancanagara Wetan terdiri dari, Panaraga, Kediri, Madiun, Pacitan, Magetan, Caruban, Kaduwang, Pace, Kertasana, Sarengat dan Blitar, Jipang, Grobogan, Warung, Sela, Blora, Rawa, Kalangbret, Japan, Wirasaba (Majaagung), Barebeg dan Jagaraga.

Untuk wilayah diluar Mancanagara disebut dengan pasisir. Dimana wilayah ini letaknya paling jauh dari pusat keraton. Pasisir dibagi menjadi dua bagian yaitu Pasisir Wetan (Timur) dan Pasisir Kulon (Barat). Pasisir Wetan yaitu daerah dari pantai Demak ke barat. Sedangkan Pasisir Kulon yaitu daerah Jepara ke arah timur. Wilayah ini semakin hari semakin menyusut dikarenakan penggabungan dengan paksa oleh Belanda pada jaman itu.

Setelah pembagian tersebut penyebaran kota Yogyakarta diikuti dengan istana Keraton melanjutkan perluasan ke arah Utara yang berwujud Benteng Kompeni, pasar, tempat tinggal residen, hunian patih, dan kampung penduduk Cina, Belanda, dan Arab yang terletak di luar tembok Keraton. Pusat Kota Yogyakarta berupa istana yang dipageri berupa benteng berparit. Sama dengan tulisan Suromihardjo (2000) bahwa Keraton dikelilingi tembok memuat 15.000 penduduk yang bekerja dalam lingkungan keraton. Area ini sering disebut dengan istilah Jeron Benteng yang isinya yaitu Alun-alun utara, Teratag Pagelaran, Shitinggil Kemandungan, Kedaton, Magangan, Kemandungan Kidul, Shitinggil Kidul, dan Alun-alun Kidul. Benteng yang mengelilingi istana dan komplek rumah di sekitar istana yang digunakan oleh kaum bangsawan, kerabat raja, dan hamba istana dibangun pada tahun 1778. Di empat sudut benteng dibuat tempat untuk mengintai, benteng itu juga memiliki lima pintu yang disebut dengan plengkung. Plengkung tadi bernama Jagasura, Jayabaya, Nirbaya, Madyasura, dan Tarunasura (Goenawan & Harnoko, 1993).

Dalam benteng Kraton juga terdapat bangsawan dan para abdi dalem. Mereka berada dalam kampung di luar daerah istana dengan tugas yang berbeda. Seperti kampung Siliran tempat tinggal hamba silir yang mengurus lampu istana, Pesindenan kampung para wiraswara

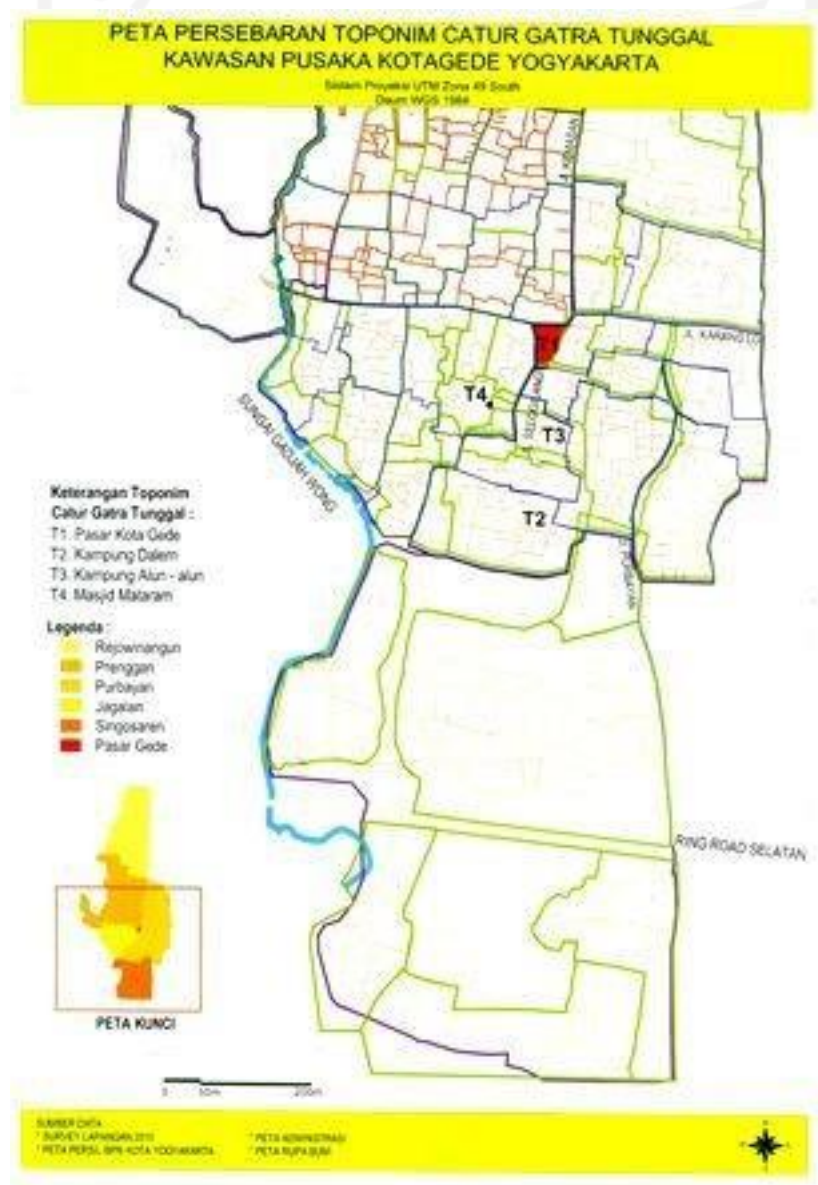
kraton, kampung Langenastran dan Langenarjan merupakan kampung prajurit pengawal istana, Patehan merupakan tempat tinggal untuk yang mengurus minuman, Nagan merupakan kampung para penabuh gamelan, Suronatan tempat tinggal ulama istana (Goenawan & Harnoko, 1993).

Penjelasan mengenai daerah pemukiman masyarakat jeron Benteng, merupakan penduduk inti bagi kota Yogyakarta. Di luar benteng daerahnya masih berupa tanah persawahan, ladang, dan pemukiman rakyat. Di sekitar benteng, pasar dan istana kepatihan terletak di sebelah utara dari keraton. Daerah tersebut merupakan pemukiman penduduk yang paling padat. Daerah pemukiman yang tumbuh di luar benteng pada awalnya merupakan tempat penduduk hamba istana dan tidak melayani rumah tangga istana. Nama kampung tersebut adalah Pajeksan, daerah ini merupakan tempat tinggal para jaksa. Kampung Gandekan merupakan tempat tinggal pesuruh istana/gandek. Dagen merupakan kampung kediaman tukang kayu/undagi. Jlagran kampung perajin penata batu/jlagra, Gowongan merupakan kampung tukang kayu ahli bangunan/gowong, Menduran merupakan kampung orang Madura, Wirobrajan, Patangpuluhan, Daengan, Jogokaryan, Prawirotaman, Ketanggungan, Mantrijeron, Nyutran, Sukokarsan dan Bugisan merupakan kampung untuk para pasukan istana semenjak keraton dibangun Sultan HB I (Goenawan & Harnoko, 1993).

Mergangsan merupakan kampung para tukang kayu bangunan/mergongso. Keparakan merupakan kampung pelayan istana. Gerjen merupakan kampung tukang jahit/gerji. Kauman merupakan kampung kaum ulama istana. Gedong Tengen adalah kampung hamba istana yang bertugas di bagian luar istana. Gedong Kiwo merupakan kampung hamba yang bertugas merawat harta istana. Timuran, Ngabean, Pugeran, Notoprajan, Notojudan merupakan kampung untuk para bangsawan di luar istana. Di daerah benteng berkembang kampung orang-orang Eropa dan sekitar pasar berkembang kampung orang Cina (Goenawan & Harnoko, 1993).

Tidak hanya pembagian saja namun dalam menata ruang kerajaan Mataram Islam punya konsep tersendiri. Dalam menata ruang kerajaan mataram islam memiliki beberapa cara atau konsep dalam menatanya yaitu konsep Catur Sagotra, konsep Golong Gilig, dan konsep Pengendalian Kota Pemerintahan dan Pertahanan Kota. Konsep ini terbentuk berdasarkan kehidupan sosial, kenegaraan dan fungsional (Suryanto dkk, 2015). Konsep Catur Sagatra atau yang bisa disebut Catur Gatra Tunggal, konsep ini percaya bahwa pemerintah tidak dapat dipisah dari aspek ekonomi, religius, dan sosial budaya. Konsep ini menggambarkan kondisi

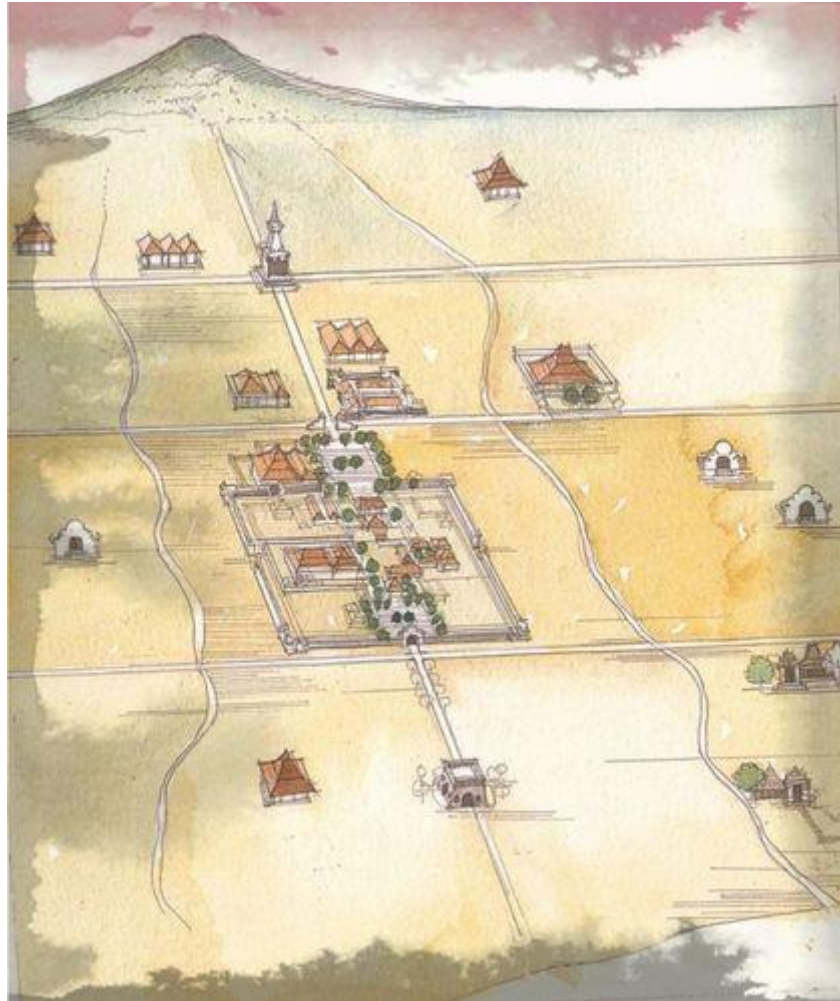
yang harmoni dari alam semesta, dimana terdapat mikrokosmos dan makrokosmos dalam satu ruang kehidupan. Keempat komponen itu yaitu kraton, masjid gede, pasar, dan alun-alun. Empat komponen ini berada dalam satu wilayah, dihubungkan oleh ruang jalan yang berfungsi menjadi inti kota. Empat komponen ini mewakili kraton sebagai pemerintahan atau pemimpin, masjid sebagai religi, pasar sebagai ekonomi, dan alun-alun sebagai sosial budaya (Suryanto dkk, 2015). Lokasi kraton sendiri secara makrokosmos mempertimbangkan konsep papat kiblat lima pancer. Konsep ini merujuk pada keraton menjadi pusat empat mata angin yang ada. Utara merujuk pada keberadaan Btari Durga sebagai dewi Hutan Krendawahono, Timur merujuk pada Sunan Lawu dan Gunung Lawu, Selatan merujuk pada Ratu Kidul, dan Barat merujuk pada Kyai Sapu Jagad Gunung Merapi (Miksic JN dalam Urfan dkk, 2022).



Gambar 3.1 Peta Catur Gatra Tunggal

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/The-location-of-Catur-Gatra-Tunggal-Heritage-Sites-in-Kotagede-Yogyakarta-Source_fig3_322204595/download

Selanjutnya ada konsep Golong Gilig yang berarti sesuatu yang utuh. Konsep ini secara tersirat menyampaikan tentang semangat dan niat yang dapat menyatukan semua golongan. Konsep ini diperlihatkan dalam bentuk tugu yang diletakkan pada garis imajiner lurus dari kraton hingga Gunung Merapi. Antara kraton hingga Merapi dihubungkan menggunakan jalan yang bernama Margo Utomo, Malioboro atau memakai obor, dan Margo Mulyo. Nama yang ada mencerminkan relasi antara impian yang mulia harus dicapai dengan cara yang mulia pula, untuk menuju keutamaan, berbekal pengetahuan yang sudah diajarkan oleh wali atau sesepuh. Tugu di utara merupakan simbol satu tujuan yang tidak akan bergeser walaupun banyak rintangan. Di selatan terdapat panggung Krapyak untuk mengamati binatang buruan di hutan Krapyak. Sumbu imajiner ini membentuk kesatuan simbolisasi lingga – yoni, yang mana perwujudan konsep manunggaling kawulo gusti. Konsep ini juga merupakan pengingat untuk tidak lupa diri. Mengingatkan kita bahwa kehidupan berasal dari Allah. Konsep tersebut diperwujudkan dalam simbol-simbol ruang yang ada pada Tugu-Panggung Krapyak/garis imajiner (Suryanto dkk, 2015).



Gambar 3.2 Konsep sumbu filosofi

Sumber: <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/29194/sumbu-filosofi-kraton-ngayogyakarta/>

Selanjutnya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sejarah tempat terjadinya perekonomian yang terkandung dalam konsep Catur Gatra Tunggal yaitu pasar yang dekat dengan kraton. Sejarah ini perlu dipahami agar dapat memudahkan dalam melihat disiplin yang melibatkan Sultan sebagai pemimpin. Saat ini pasar di Yogyakarta yang bernama Pasar Beringharjo terletak di area Malioboro yang menjadi pusat perekonomian Yogyakarta saat ini. Tidak hanya pasar para PKL juga menjadi pundi-pundi untuk menyumbang perekonomian di Yogyakarta. Malioboro sudah ada sejak berdirinya Kraton Yogyakarta. Sama dengan pendapat Carey dalam Fauziah (2018) berpendapat bahwa jalan raya ini sudah ada dan dipakai untuk acara perayaan tertentu selama 50 tahun, tepatnya sebelum Inggris mendirikan pemerintahan di Jawa (1811-1816). Malioboro menjadi penghubung untuk Tugu dan Keraton tentunya tidak terlepas dari konsep tata kota Keraton Yogyakarta. Garis filosofi yang menghubungkan Tugu Golong Gilig – Keraton Yogyakarta – Panggung Krapyak melukiskan konsep sangkan

paraning dumadi yang berarti asal dan tujuan adanya hidup. Konsep ini juga dikenal dengan istilah garis imajiner. Dari Panggung Krapyak – Kraton Yogyakarta melukiskan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa (sangkaning dumadi). Dari Tugu Golong Gilig ke selatan melukiskan perjalanan manusia yang akan menghadap Sang Pencipta yang disebut paraning dumadi (Priyono dalam Fauziah, 2018).

Jalan yang terdapat di Malioboro merupakan raja marga atau bisa disebut jalan kerajaan. Malioboro berfungsi sebagai jalan untuk merayakan acara tertentu, seperti hari perayaan, atau hari besar lainnya. Jalan ini merupakan tempat kedatangan dari Utara ke Selatan, para Gubernur Jendral dan pejabat Eropa saat kunjungannya di Yogyakarta. Carey dalam Fauziah (2018) berpendapat bahwa kedatangan Gubernur Jendral melewati Jalan Malioboro untuk melaksanakan dua tujuan bagi orang Jawa, yaitu memberikan penghormatan oleh tamu terhormat dan melakukan upaya untuk menanggulangi kekuasaan yang besar.

Seperti yang terlihat di atas, sejak sudah ada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara keruangan Malioboro telah menjadi bagian yang utuh dari tata ruang ibukota kerajaan. Tidak hanya sebagai jalan kerajaan dan terletak pada garis imajiner, disini juga terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gedhe sebagai pusat perekonomian. Keduanya merupakan komponen dalam tata ruang yang merujuk konsep Catur Gatra Tunggal. Terdapat empat komponen penting dari konsep ini yaitu pemerintahan (Kraton dan Kepatihan), religi (Masjid Gedhe), ekonomi (Pasar Gedhe), dan sosial (Alun-alun) (Fauziah, 2018).

Pasar Gedhe yang berjarak kurang lebih 450 meter selatan tempat Kepatihan pada mulanya hanyalah tanah lapang. Tempat ini menjadi resmi digunakan untuk ajang pertemuan rakyat setelah diresmikan oleh Sultan HB I pada tahun 1758. Maka selanjutnya masyarakat mulai memanfaatkan tempat lalu mendirikan seperti atap atau payon sebagai peneduh di saat melakukan transaksi dengan pembeli. Makin lama semakin banyak pula pedagang yang berjualan terutama orang lokal setempat. Sehingga dibangunlah sebuah tempat berupa los-los berbentuk limasan dengan tiang kayu jati namun tanpa dinding, berjajar dari selatan ke utara untuk para pedagang pada tahun 1830. Tempat yang dari kayu tadi mulai diganti dengan bangunan semen dan beton oleh Hollandsche Beton Maatschappij perintah Sultan HB VIII pada tahun 1923-1926. Lalu dijuluki Een der Mooiste Passers op Java atau Pasar Terindah di Jawa. Setelah Sultan HB IX naik tahta nama Pasar Gedhe tadi diganti menjadi Pasar Beringharjo (Artha dalam Fauziah, 2018).

Sejarah pasar di Yogyakarta tentunya tidak jauh akan membicarakan perihal pasar beringharjo yang terletak di area Malioboro. Petunjuk bahwa keberadaan pasar sudah ada di Yogyakarta telah terlihat semenjak Kotagede didirikan. Keberadaan Kotagede sejak akhir abad 17 memiliki dua tempat yang penting karena fungsinya dan tentunya dihormati. Kedua tempat tersebut adalah makam raja serta pusat industri dan perdagangan (Charis dalam Suratno, 2003).

Pasar Kotagede saat ini terletak di pusat kota disinyalir merupakan lanjutan masa lalu walaupun dari segi bentuk sudah berubah. Ini didasari letak pasar yang saat ini berada di sebelah utara alun-alun. Pasar Gedhe saat ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat perekonomian dan perdagangan bagi masyarakat kota Yogyakarta (Suratno, 2003).

Pasar Gedhe/Beringharjo saat ini juga merupakan salah satu unsur dari Catur Gatra Tunggal dalam penataan tempatnya. Catur Gatra Tunggal melibatkan empat komponen penting seperti keraton, pasar, masjid, dan alun-alun. Keraton Yogyakarta melambangkan pemerintahan, Pasar Gedhe/Beringharjo melambangkan perekonomian, Masjid Agung Kauman melambangkan religi, dan Alun-alun utara melambangkan sosial publik (Alhazmi, 2020).

Selama tahun 1830-1870 para pemodal swasta menyewa tanah kasultanan dan mulai membuka berbagai usaha industri dan perkebunan di Yogyakarta. Sejak itu banyak pengusaha, terutama Eropa yang datang ke Yogyakarta. Bertepatan dengan dihapuskannya *culturstelsel* pada 1870, menjadikan hilangnya beberapa hak istimewa Yogyakarta. Di sisi lain Yogyakarta menjadi lebih terbuka bagi perusahaan swasta dengan adanya UU Agraria 1870. Titik puncak dari perencanaan kota Yogyakarta yaitu beberapa tahun setelah direalisasikan UU Desentralisasi 1903. Malioboro menjadi wilayah yang mengalami perkembangan paling terlihat. Kurun waktu 1870-1920 an beberapa fasilitas didirikan di kawasan Malioboro untuk menunjang perekonomian Yogyakarta, seperti Stasiun Tugu, De Javasche Bank Kantor Cabang Yogyakarta (saat ini Bank Indonesia), Telefoonkantoor (PTT) (saat ini Kantor Pos Besar Yogyakarta), Kantor Asisten Residen (saat ini markas Korem 072 Pamungkas), Kediaman Residen, Pegadaian Ngupasan, gedung perkantoran (saat ini Bank BNI), dan perusahaan lainnya.

Jalan Malioboro yang awalnya masih sepi mulai perlahan menjadi pusat ekonomi Yogyakarta. Pasar Gedhe/Pasar Beringharjo semakin ramai dan memikat para pengusaha dan pedagang, terkhusus untuk masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa menjadi tertarik dan membuka warung di dekat pasar. Warung-warung mulai ada di sekitar Tugu hingga Pasar

Gedhe, setelah meluasnya masyarakat Tionghoa dari Kranggan sampai ke bagian selatan rel kereta api di daerah Kota Yogyakarta atas ijin Sultan (Darmosugito dalam Fauziah, 2018). Sebelum 1880, pasar masyarakat Tionghoa tidak terlalu besar, hanya terdiri dari warung-warung. Warung yang tergolong besar berada di dekat Kepatihan (Purwalelana & Surjomihardjo dalam Fauziah, 2018). Kampung orang Cina di sekitar Pasar Beringharjo memperlihatkan bahwa kehidupan ekonomi antara pasar dan masyarakat Cina tidak bisa dilepaskan. Ini dikarenakan sumber penghasilan masyarakat Cina pada masa itu adalah pedagang, pemungutan pajak, pemilik rumah candu. Cukai pasar digadaikan kepada para masyarakat Cina kaya dimana mereka mampu membayar sekaligus untuk waktu satu tahun dan bisa lebih. Peran orang Cina selalu berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Ini mengakibatkan meluasnya pemukiman Cina ke daerah utara kota tepatnya Kranggan (Goenawan & Harnoko, 1993). Tidak hanya itu Kegiatan ekonomi di diperlihatkan dengan kota Yogyakarta menampung kegiatan jual beli dari para santri. Selain menjadi jalan untuk upacara Malioboro juga menjadi tempat kegiatan ekonomi (Suromihardjo, 2000).

Awal abad ke-20 Malioboro berubah menjadi jalan yang berisi pertokoan kolonial tersibuk di Yogyakarta. Warung yang sebelumnya ada berubah menjadi toko-toko permanen di tepi jalan. Toko-toko tersebut dibangun di kedua sisi jalan. Sama halnya dengan jalan pertokoan kolonial lainnya, di jalan Malioboro ini bagian kanan maupun kiri terdapat rumah-rumah, hotel, kantor, tempat makan/restoran, dan bioskop. Semua ini dimiliki oleh orang Tionghoa, Eropa, orang lokal, Jepang, India, dan sebagainya. Ini semua dilakukan dengan menyewa tanah yang di iklankan di surat kabar yang disebut Sultan Ground (SG). Selama periode kolonial Malioboro mencapai puncak keemasannya pada 1920an – 1930an, sebelum terkena dampak dari Depresi Ekonomi Global. Dimana mengakibatkan harga-harga yang ada di Malioboro cenderung tidak stabil dan beberapa pengusaha harus gulung tikar.

Sejarah di atas memperlihatkan kepada kita bahwa peran Raja sebagai pemimpin keraton di Jawa sangatlah penting dalam mengatur keseluruhan kerajaan. Salah satunya faktor ekonomi yang diperlihatkan dalam sejarah Sultan HB 1 dimana beliau dapat meresmikan tempat yang nantinya akan digunakan masyarakat untuk kegiatan jual beli. Keterangan sejarah ini memperlihatkan kepada kita bahwa *power* dari Raja di keraton Jawa sangatlah besar. Dimana masyarakat akan melakukan ketika sudah ada arahan dari raja, jika belum masyarakat juga tidak akan bergerak.

Maka demikian pada zaman Sultan HB VIII tempat yang diresmikan Sultan HB 1 dibangun dan dibuat menjadi pasar. Peran Raja dalam disiplin ini memang sangat banyak. Beliau dapat memberikan tempat dan mengarahkan pedagang untuk disiplin yang ingin dibangun dan dibentuk oleh Raja. Sama halnya dalam konsep sejarah yang mengatakan bahwa perintah raja adalah keinginan tuhan yang sudah dituliskan di atas, membuat rakyat tentunya senang dan tidak komplain akan disiplin yang dibentuk oleh Sultan/Raja Jawa. Upaya pendisiplinan dari Raja tidak selesai di masa Sultan HB VIII. Belum lama ini terjadi pula upaya untuk pendisiplinan para PKL yang dilakukan Sultan HB X.

3.1.2 Peran Raja dan Wacana dalam Penertiban PKL Malioboro

Peran raja dalam pendisiplinan ini sesuai dengan kedudukan raja yang sudah disebutkan di atas dimana raja dalam politik adalah menjaga ketertiban (Moertono, 2017). Raja menjaga agar tidak terjadi gangguan-gangguan dan menjaga ketertiban. Konsep ini mengungkap ungkapan *njaga tata tentreming praja* yang berarti menjaga ketertiban dan kepentingan negara. Maka dari itu raja harus menjaga seluruh wilayah kerajaannya serta mempertahankan dan memelihara di seluruh bagian ruang di kerajaannya.

Mengapa peran raja dalam penertiban ini masuk kategori politik? Hal ini dikarenakan semua kejadian dan komponen yang ada di kerajaan selalu terdapat campur tangan politik. Raja dalam pendisiplinan PKL ini berperan sebagai penjaga ketertiban bagi masyarakat sekitar. Seperti yang sudah tertulis di latar belakang bahwa tempat dagang yang digunakan PKL sebelum direlokasi bukan ditujukan untuk para PKL. Tempat berdagang tersebut sebenarnya ditujukan untuk para pemilik toko yang mana menjadi hak mereka. Tidak hanya ini penertiban juga didasari dari sumbu imajiner yang dipelihara penampilannya. Peran Sultan yang menjadi penjaga ketertiban tentunya sudah sesuai dengan sejarah yang tertulis dalam kedudukannya sebagai Raja. Ketertiban ini dijaga guna meminimalisir konflik yang akan terjadi jika tidak dipindah.

Namun perlu diingat, jika menilik sejarah dan kedudukan Sultan sebagai Raja. Sewajarnya perintah Sultan untuk relokasi adalah mutlak. Ini dikarenakan kedudukan Sultan yang sebagai wali tuhan yang sudah dituliskan di atas. Dimana perintah Sultan merupakan kehendak Tuhan. Para PKL jika menyadari hal tersebut seharusnya merasa bangga dan mulia akan perintah Sultan yang merupakan perantara antara manusia dan Tuhan. Peran lain dari Sultan dan wacana akan dibicarakan lagi dibarengi dengan pembicaraan mengenai disiplin apa yang ingin dibentuk oleh Sultan dalam *event* ini.

Pendispilan yang dilakukan ini tentunya ada maksud dan tujuan tertentu dalam relokasinya. Relokasi yang dilakukan secara cukup besar memberikan gambaran bahwa event ini memang memiliki tujuan yang pasti. Pendisiplinan yang dilakukan oleh Sultan ini tentunya akan kita ketahui melalui teori Michel Foucault tentang disiplin yang memiliki empat komponen yaitu *The Art of Distribution*, *The Control of Activity*, *The Organization of Geneses*, dan *The Composition of Forces*.

a. *The Art of Distribution*

Ruang dalam disiplin cenderung dibagi menjadi banyak bagian karena ada tubuh yang didistribusikan. Individu harus menghilangkan efek dari distribusi yang tidak tepat, guna menetapkan apa yang berguna bagi individu. Maka dari itu Distribusi ruang merupakan peninggalan lokal, dimana peninggalan tersebut berdasarkan pemanfaatan suatu nilai kegunaan yang sesuai. Maka setelah itu akan membentuk dari tubuh untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Motif pembagian ruang para PKL Malioboro didasari dengan hal yang unik yaitu Sumbu Imajiner. Seperti yang diketahui beberapa alasan Sultan merelokasi PKL Malioboro salah satunya ingin mengusulkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia (nasional.tempo.co, 27 Januari 2022). Dikarenakan Sumbu Filosofi/garis imajiner yang diusulkan ke UNESCO, maka para PKL harus dipindah/direlokasi. Sultan tidak mau dianggap melanggar hukum dengan UNESCO ketika mengusulkan kerjasama, namun trotoar yang merupakan bagian dari garis imajiner justru digunakan oleh PKL. Garis imajiner memang sudah ada sejak dulu yang tertanam di pikiran hingga telah menjadi budaya Yogyakarta. Garis imajiner menghubungkan dari Tugu-Panggung Krapyak (Suryanto dkk, 2015). Dalam pemindahan PKL uniknya garis imajiner menjadi alasan yang diutarakan Sultan Yogyakarta

Tapi ternyata alasan tersebut justru mendapat respon yang kurang menyenangkan dari para PKL. Banyak yang lapang dada akan alasan pemindahan tersebut. Seperti para PKL yang sudah diwawancarai kebanyakan dari mereka hanya berlapang dada atas putusan raja mereka. Namun beberapa seperti Bapak A mengutarakan bahwa hal tersebut merupakan budaya jadi tidak apa-apa jika dihormati sebagai dasar pemindahan tempat. Dalam kasus ini Bapak A sepertinya sudah paham akan maksud alasan tersebut digunakan dasar pemindahan PKL oleh Sultan. Memang ditemukan informasi yang justru pedagang hanya bisa pasrah akan hal yang ada, namun dibalik itu terdapat pula budaya yang dapat dilestarikan seperti yang dikatakan Bapak A.

“Yaaa kalo garis imajiner kan udah lama to mas, di awal yogyakarta dibentuk

Berarti maksud bapak ini kaya budaya gitu ya, seperti melestarikan budaya?

Iyaa heeh”

Melihat terdapat PKL yang masih mengerti akan maksud budaya yang ingin dilestarikan memang baik. Namun di sisi lain para PKL yang berlapang dada mengingatkan kita pada kejadian Pangeran Puger ketika Cakraningrat mendesaknyanya agar menentang perintahnya, Amangkurat III (Moertono, 2017):

“...bila ada yang berani menentang Sultan/raja, nasib malang akan menimpanya, karena raja adalah warana Allah”.

Nampak seperti yang dijelaskan dalam konsep *kawula-gusti*. Dimana raja memang memiliki peran lebih tinggi daripada hambanya diiringi rasa syukur dan patuh. Sepantasnya perintah raja adalah mutlak dan harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat atau hambanya (Moertono, 2017). PKL memang tidak terlalu diberikan pilihan tentang garis imajiner yang menjadi alasan dilakukannya relokasi PKL Malioboro, mengingat itu adalah perintah dari wakil Tuhan.

Setelah itu distribusi ruang para PKL Malioboro dilakukan Sultan beserta pemerintah kota maupun pemerintah daerah Yogyakarta melalui proses relokasi. Relokasi yang konotasinya memindahkan sesuatu membuat proses ini dapat dimanfaatkan sekaligus untuk menata hal-hal yang diinginkan. Relokasi PKL Malioboro membuahkan hasil dimana penataan dilakukan dengan membuat dua tempat yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 guna menjadi tempat berdagang PKL Malioboro yang baru. Dalam melaksanakan perannya melakukan relokasi serta penertiban, Sultan dibantu pemerintah kota untuk mengatur dan menata PKL yang sudah ditempatkan.

PKL dibagi menjadi ke dua ruang yang telah disediakan Sultan yaitu Teras Malioboro 1 dan 2. Teras Malioboro 1 bertempat pada gedung lama/bekas bioskop yang bernama Bioskop Indra. Dari luar bentuk Teras Malioboro ini berbentuk gedung yang megah dan apik seperti mall yang ada di Yogyakarta. Teras Malioboro 1 ini dibentuk dengan memerhatikan aspek estetik di bagian gedungnya. Teras 1 Malioboro walaupun terkadang masih banyak kebocoran ketika hujan, namun tempat ini lebih nyaman dari pada Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 ini tertutup rapat dan dengan atap yang lebih layak. Maka dari itu ketika hujan angin tidak ada air yang masuk ke dalam Teras ini. Tempat untuk kuliner di Teras Malioboro 1 nampak baik

dan nyaman ketika digunakan untuk bersantai sambil makan, area kuliner Teras Malioboro 1 juga lebih terpusat. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa gambar fisik Teras Malioboro 1.



Gambar 3.3 Tampak Depan Teras Malioboro 1 (Foto oleh Peneliti)

الجمعة، السبت، الأحد
الجمعة، السبت، الأحد



Gambar 3.4 Area Kuliner Teras Malioboro 1 (Foto oleh Peneliti)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

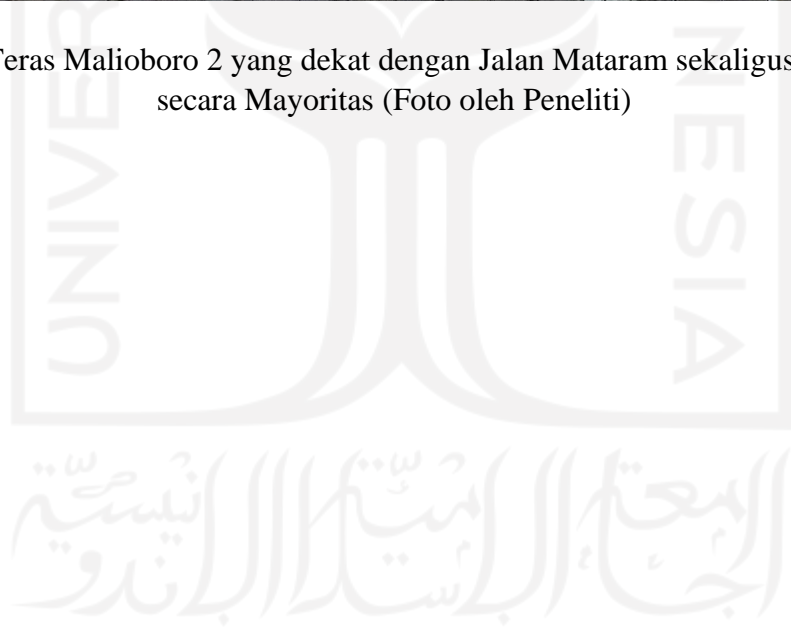


Gambar 3.5 Tampak dalam Area Teras Malioboro 1 (Foto oleh Peneliti)

Selanjutnya ada Teras Malioboro 2 yang berlokasi pada gedung lama/bekas milik Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada perbedaan yang cukup signifikan dalam bentuk fisiknya antara Teras 1 dan 2. Teras 2 Malioboro tidak berbentuk gedung tingkat yang megah seperti halnya Teras 1. Teras Malioboro 2 berbentuk bangunan lebar yang memuat kios-kios dan lapak dari para PKL. Teras Malioboro 2 ini tidak terlalu tertutup, maka dari itu ketika hujan kios bagian pinggir dari Teras Malioboro 2 dapat terkena hujan. Tidak hanya itu Teras 2 terkadang banjir jikalau hujan sangat lebat sedang terjadi. Area kuliner di Teras Malioboro ini sedikit terpisah pisah, walaupun mayoritas berada di area Teras 2 yang dekat dengan Jalan Mataram, namun biasanya para pedagang menggelar karpet di bagian rumput untuk duduk para pembeli yang ingin makan karena tempat kios tidak terlalu besar. Untuk lebih jelasnya berikut foto dari area Teras Malioboro 2.



Gambar 3.6 Teras Malioboro 2 yang dekat dengan Jalan Mataram sekaligus area Kuliner secara Mayoritas (Foto oleh Peneliti)





Gambar 3.7 Tampak dalam Teras Malioboro 1 (Foto oleh Peneliti)

الجمعة الإسلامية الأندلسية



Gambar 3.8 Teras Malioboro 2 dari Jalan Malioboro (Foto oleh Peneliti)

Teras Malioboro 1 dan 2 hadir karena adanya relokasi yang dilakukan oleh Sultan. Tempat ini menjadi pengganti tempat berdagang yang sebelumnya ada di trotoar. Dibuat dua Teras karena kuota PKL yang banyak tidak mungkin jika hanya dijadikan di satu tempat di area Malioboro. Pembagian Teras Malioboro sendiri berdasarkan pembagian yang sudah ada dalam PKL yaitu komunitas Pemalni mendapatkan Teras Malioboro 1 dan Tridharma mendapatkan Teras Malioboro 2.

Pemalni merupakan paguyuban/kelompok yang terbentuk dari inisiatif para pedagang Malioboro yang berdagang di depan pintu toko atau bisa dibilang persis di depan toko dulu sebelum relokasi. Sedangkan Tridharma merupakan paguyuban yang terbentuk inisiatif pedagang Malioboro yang berdagangnya dulu di depan toko (yang mereka bukalapak menggunakan terpal) dulu sebelum relokasi. Ini dijelaskan oleh salah satu narasumber yang bernama Ibu M PKL di Teras Malioboro 1:

....“ Terus kita bikin kelompok/paguyuban, setelah terbentuk kita bikin grup namanya pemalni/pedagang malioboro. Setelah dibikin itu kita sampe hari ini kita pindah disini di Teras Malioboro 1. Paguyuban saya pemalni (pedagang malioboro) itu kan memang dapet Teras 1, kalo sana kan Tridharma dapet Teras 2. Saya pinggiran toko, kalo Teras 2 depannya toko. ya, yang di depan pintu toko persis, kalo yang sana yang buka lapak di depan pake terpal”...

Pembagian kelompok ini didasarkan dengan yang ada sebelumnya dimana para PKL inisiatif membentuk kelompok untuk mempermudah dalam koordinasi dan komunikasi antar pedagang. Pembagian yang dilakukan PKL untuk membagi komunitas dimana saat berdagang ada di depan toko dan pinggiran toko bertujuan untuk mempermudah pembagian dalam kelompoknya. Pedagang yang dulunya berdagang di depan toko dan pinggiran toko merupakan kriteria dari Tridharma dan Pemalni. Kedua kelompok ini memiliki pemimpin yang berguna untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah setempat dan segala keluhan para PKL. Pemimpin yang ada dipilih karena PKL merasa cocok dan memang disegani di antara PKL. Yang perlu diketahui adalah walaupun kelompok ini adalah inisiatif para PKL namun kelompok ini tetap berhubungan dan dikontrol Sultan. Ketua yang ditunjuk tadi adalah media yang menghubungkan antara pemerintah dan para PKL yang membuat kelompok ini tidak sepenuhnya bebas.

Komunitas Tridharma dan Pemalni tidak memiliki aturan yang ketat di dalamnya. Ini dikarenakan kelompok ini dibentuk untuk mempermudah koordinasi. Maka dari itu pengambilan keputusan kelompok dilakukan dengan cara berdiskusi di kelompok secara bersama untuk mencapai kesepakatan. Ketika sudah sepakat maka akan diajukan ke pemerintah dalam bentuk aspirasi atau keluhan mereka.

Pembagian ruang secara besar seperti yang sudah dituliskan di atas merupakan upaya yang dilakukan Sultan untuk menertibkan pedagang agar tidak iri atau lainnya. Pembagian secara besar ini dilakukan juga guna mempermudah dan mempercepat proses pembagian ruang. Setelah dilakukan pembagian secara besar paguyuban maka proses pembagian ruang selanjutnya yaitu di masing-masing Teras Malioboro. Ada sedikit perbedaan dalam proses pembagian tempat/kios yang ditempati pedagang antara Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Berikut gambar atau denah pembagian Teras Malioboro 1.



Gambar 3.9 Denah Teras Malioboro 1 (Foto oleh Peneliti)

Pada Teras Malioboro 1 gedung A merupakan gedung utama yang berisi dagangan seperti pakaian, oleh-oleh, mainan kayu, dan lainnya. Sementara gedung B, C, dan D dikhususkan untuk mereka yang dagang makanan atau kuliner, terletak di bagian Utara Gedung A. Untuk Teras Malioboro 1 dilakukan pembagian dengan cara di lotre di setiap gedungnya. Namun lotre atau undian ini tidak dilakukan secara individu/perorangan melainkan secara kelompok. Seperti yang dikatakan Ibu M:

“Ohh awalnya ini di lotre mas dari sananya, lotrenya bukan dari satu dua tapi kita punya kelompok, misal saya kelompok delapan jadi di lotre kelompoknya. Jadi kita tetep tetangaan untuk kelompok, engga satu-satu.”

Pembagian menggunakan lotre memanglah kesepakatan antara PKL dan Pemerintah setempat untuk menghindari konflik dan dirasa adil bagi para PKL. Pembagian ruang memanglah sering berhadapan dengan konflik seperti halnya pembagian yang ditulis dalam

Perjanjian Giyanti juga melibatkan banyak konflik di dalamnya (Sugiyanto, 2016). Pembagian lotre ini sebenarnya untuk menghindarkan dari konflik namun disisi lain ini juga memberikan anggapan Sultan nampak sebagai pemelihara (Moertono, 2017). Sultan memberikan kebebasan dan menghindar dari konflik PKL seolah-olah justru menjadi pemelihara bagi mereka, karena memberikan pilihan kepada para PKL. Basis lotre adalah keuntungan belaka yang semuanya memiliki peluang yang sama. Ini ada kaitannya dengan Sultan dimana keuntungan sama halnya dengan takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Moertono (2017) Sultan diibaratkan menjadi wakil Tuhan, dimana keputusannya adalah perintah Tuhan. Sama halnya dengan lotre yang menjadi takdir Tuhan, maka disitu peran Sultan menjadi wakil tuhan dengan memberikan pilihan kebebasan menggunakan lotre yang sebenarnya metode tersebut juga merupakan bagian dari takdir Tuhan yang diwakilkan keputusannya oleh Sultan.

Selanjutnya untuk Ibu M sendiri masuk ke dalam kelompok delapan, di mana kelompok delapan sebelum relokasi berdagang di daerah depan kantor gubernur hingga toko Ramai. Untuk urutannya sendiri di Teras Malioboro 1, urutan yang mendapat nomor satu terletak di paling depan gedung, di pintu masuk gedung. Selanjutnya nomor dua dan seterusnya tinggal diurutkan ke belakang saja. Jadi perkelompok ini dagangannya sejenis atau yang mirip seperti yang tertulis di denah atas. Kegiatan yang terjadi di atas sesuai dengan apa yang diutarakan Foucault (1995), dimana ruang dalam disiplin cenderung dibagi menjadi banyak bagian karena ada tubuh yang didistribusikan.

Selanjutnya proses lotre dilakukan dengan perwakilan perkelompok tadi yang merupakan orang yang dirasa dapat mewakili para PKL. Perwakilan kelompok akan dikumpulkan oleh ketua paguyuban yang diarahkan oleh pemerintah kota. Pemerintah memberikan arahan kepada para PKL untuk membagi secara adil. Para pedagang mengusulkan untuk dilakukan lotre namun secara perkelompok. Lotre dilakukan karena menurut pedagang ini jalan keluar supaya masing-masing pedagang tidak iri satu sama lain.

Untuk Teras Malioboro 2 pembagian sama juga dilakukan secara undian/lotre juga, namun yang membedakan adalah undian ini dilakukan perorang tidak secara kelompok. Jadi mereka yang pindah di Teras Malioboro 2 belum tentu tetangga dengan PKL saat sebelum direlokasi. Untuk proses pembagiannya berawal dari paguyuban Tridharma yang merupakan kumpulan PKL yang ada di Teras Malioboro 2. Mereka berkumpul untuk rapat anggota lalu mereka melanjutkan ke tempat atau kantor UPT namun tetap didampingi oleh pemerintah kota. UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) memang bertugas dalam mengatur untuk PKL Malioboro. UPT

merupakan badan yang melaksanakan teknis dan dibawah oleh dinas Pariwisata kota Yogyakarta. Fungsinya sendiri yaitu tertulis di pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017, dimana UPT memiliki fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di kawasan Malioboro. Berikut yang dikatakan Bapak W PKL Teras Malioboro 2:

“Awalnya dari paguyuban, sebelum paguyuban kan sudah ada seperti rapat-rapat masing-masing anggota per kelompok terus nanti ketempat tata kota”

Perkataan dari Bapak W ini sependapat dengan yang diungkapkan PKL Teras Malioboro 2 Bapak A:

“kita di kantor UPT dipanggil untuk ambil kaya lotre arisan, kaya gitu prosesnya”

Pembagian ruang menggunakan lotre ini memang efektif dan memberikan keadilan bagi para PKL. Mereka setuju akan apapun hasilnya dan menerima dengan ikhlas. Namun ada catatan penting bahwa pembagian ruang di Teras Malioboro 2 tetap dikelompokkan berdasarkan dagangannya seperti makanan/kuliner, oleh-oleh makanan, pakaian dan lainnya. Untuk kuliner ditempatkan di bagian Teras Malioboro 2 sebelah timur, tepatnya di pintu masuk dari arah Jalan Mataram. Jadi walaupun di lotre namun undian tersebut tetap ada sebagian yang dikelompokkan. Seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.10 bagian utara Teras Malioboro 2 (Foto oleh Peneliti)

Untuk makanan atau kuliner juga terdapat di dalam gedung ditempatkan di bagian paling utara dan paling selatan Teras Malioboro 2. Seperti gambar berikut.

UNIVERSITAS
INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاستدرا الأندونيسية



Gambar 3.11 salah satu tampilan kuliner yang ada di bagian Utara dan Selatan Teras Malioboro 2 (Foto oleh Peneliti)

Untuk bagian tengah lorong di tempatkan dagangan yang berjenis oleh-oleh makanan seperti bakpia, karak, dan lainnya. Untuk dagangan seperti pakaian dan aksesoris atau lainnya tersebar di tempat-tempat selain yang disebutkan di atas.

Dalam pengaturan ruang yang ada regulasi dibentuk dengan cara bernegosiasi antara PKL dan pemerintah kota. Mengusulkan pembagian secara adil menggunakan lotre atau undian saja. Regulasi nampak berbeda di Teras 1 dan 2 dimana Teras 1 diundi secara kelompok dan Teras 2 secara individu. Hasil dari undian bersifat wajib ditaati oleh semua PKL, para PKL juga tidak dapat berpindah tempat untuk kedepannya. Seperti yang dikatakan Ibu M:

“Engga bisa mas, dari awal kesepakatan dari lotre disini yaudah di sini terus, biar ga ada iri gitu mas. Kalo lotre kan adil jadi harus sepakat.”

Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi bahwa lotre hanyalah bentuk untung-untungan yang merupakan takdir Tuhan. Sultan menjadi wakil Tuhan memiliki peran kuasa yang dapat mengatur PKL walaupun mereka tidak sadar atau sadar akan hal tersebut. Menjadi pemelihara karena memberikan kebebasan untuk memilih dan keadilan akan lotre menjadikan Sultan dirasa kurang melihat konflik yang ada dalam PKL saat pembagian wilayah mereka. Nampaknya kuasa sebagai wakil Tuhan memberikan keuntungan yang berarti bagi Sultan.

b. *The Control of Activity*

Peran penting Sultan tidak hanya sebatas dalam distribusi ruang saja. Disebut dalam konsep *kawula-gusti* digambarkan masyarakat Jawa dengan sebuah yang tidak goyah akan hal-hal yang memang sudah ditakdirkan. Sama halnya juga dalam sejarah yang mengatakan bahwa kedudukan Raja ini sebagai kalipatullah atau yang dapat dikatakan sebagai wali Tuhan di dunia. Maka dari itu orang Jawa percaya bahwa Sultan/raja menjadi satu-satunya perantara yang menghubungkan antara mikrokosmos manusia dengan makrokosmos dewa (Moertono, 2017). Maka demikian perintah raja adalah mutlak untuk seluruh rakyatnya. Seperti halnya yang terjadi dalam pengaturan aktivitas yang ada di Teras Malioboro 1 dan 2 yang sudah ditemukan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara.

Kontrol aktivitas guna pendisiplinan para PKL Malioboro dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksanaan Teknis). UPT sendiri memiliki tugas yang tertuang dalam pasal 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017. Tugas UPT melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT, melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro, melakukan promosi kawasan Malioboro, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban dan lalu lintas di kawasan Malioboro. Maka dari itu UPT menjadi pengawas para PKL. Perlu diketahui bahwa setelah dilakukannya relokasi dan seluruh PKL sudah pindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, mereka tidak boleh kembali lagi ke jalan atau trotoar untuk berdagang. Maka pendisiplinan aktivitas PKL mereka dipusatkan ke dua titik saja yaitu Teras 1 dan 2. Peraturan ini dibentuk oleh pemerintah kota. Namun peraturan-peraturan yang ada dibentuk dengan berdiskusi dengan para PKL, seperti yang dibicarakan Bapak A:

“Ya ini kan tiap lorong kadang ada pertemuan dari dipanggil pemkot atau UPT itu kan nanti ada himbuan sama keluh kesah akan disampaikan, disini kan sama aja kaya babad alas dulu to mas, buka lahan to kita disini. Yaa kan kita ketemu berapa kali, sharing, saling menguntungkan lah istilahnya ”

Walaupun raja dipandang tinggi dalam konsep *kawula-gusti* namun dalam kasus yang sudah disebutkan Bapak A ini juga mencerminkan gambaran konsep *kawula-gusti* lainnya. Dimana relasi raja dan rakyat Jawa ditunjukkan melalui kata momongan. Momongan berasal dari kata momong, artinya yaitu mengasuh dan membimbing dengan kasih. Dalam momong juga mengandung sifat waspada dan serta bujukan halus. Dalam *momong* ditegaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar bagi yang menjaga (pamong/raja), daripada yang dijaga (Moertono, 2017). Upaya pemerintah melakukan diskusi dengan PKL merupakan gambaran dari kata momongan dalam konsep *kawula-gusti*.

Selanjutnya ada kejadian yang kurang menyenangkan saat peneliti melakukan observasi dan wawancara. Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara masih terdapat beberapa PKL yang nekat melakukan pelanggaran dengan berjualan di jalan atau trotoar. Namun tidak lama kemudian muncul petugas yang menggusur mereka untuk pindah. Nama petugas yang menertibkan dan sekaligus pengawas PKL adalah Jogoboro.

Jogoboro merupakan petugas yang mengawasi para PKL. Jogoboro kependekan dari Jogo Malioboro merupakan petugas yang dibawah oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Bagi mereka yang melanggar peraturan dan nekat kembali dagang di trotoar akan dikenai sanksi berupa penertiban dengan cara digusur oleh Jogoboro tadi. Ini mengingatkan saya dengan apa yang ada dalam Moertono (2017), dimana prinsip pokok pemerintah Jawa adalah pilihlah pejabat dengan tanggung jawab kedaerahan dan pengaruh nya yang ada dalam masyarakat. Maksudnya yaitu ketika dipilih orang yang disegani dalam daerah tersebut untuk menjadi penjaga maka seluruh daerah tersebut akan nurut dan terjaga keamanannya. Moertono (2017), menjelaskan jika yang diangkat adalah ketua perampok maka daerah tersebut bebas dari perampok dan pembegal. Berikut ungkapan dari Ibu M:

“Kalo UPT itu ngatur yang ada, kemarin ada pedagang liar yang di pinggir-pinggir itu kan sebenarnya ga boleh nah itu dia yang memperingatkan untuk tidak jualan disitu”

Perlu diketahui pula bahwa walaupun dari mereka sudah memiliki tempat yang mumpuni di Teras Malioboro namun ada beberapa dari PKL yang ingin kembali seperti dulu berjualan di trotoar saat sebelum direlokasi. Seperti yang dikatakan Ibu M:

“Pengen mas kaya kita dulu. melihat rakyatnya seperti ini, kita itu dari pertama lho mas saya itu habis-habisan dari tabungan, ada anak sekolah, sebelum itu ada pandemi, kita jualan ga bisa habis itu dipindah kesini itu tu ada lho mas satu minggu ga laku kita, bener.”

Para PKL tetap ada yang ingin melanggar peraturan dan kembali seperti dulu, namun PKL juga menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Ini mengingatkan peneliti dengan konsep *wewenang murba wisesa* (Moertono, 2017). Dijelaskan bahwa kedudukan Sultan/raja dianggap sebagai pencerminan kedudukan Tuhan. Tuhan dianggap sebagai Murbawisesa atau Penguasa Tertinggi. Dalam konsep kelas sosial raja diletakkan di bagaian yang jauh dari jangkauan orang biasa. Berikut yang dikatakan Ibu M:

“Yaa memang kalo diliat dari dulu kita udah dikasih tempat jualan selama ini memang gratis dari toko memang pajak dll dibayari dari toko. Kalo kita mau ngeyeli sultan tapi kita ga ada kekuatan untuk itu”

Beliau lebih memilih untuk menjalani yang ada saja daripada harus melanggar peraturan. Maka dari itu Jogoboro ini bertugas dalam mengawasi hal-hal yang demikian, dimana saat peneliti melakukan observasi dan wawancara banyak PKL ini masih kurang senang dengan apa yang ada sekarang. Fungsi Jogoboro adalah menertibkan para PKL supaya ada di tempat dan beraktivitas di ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Namun perlu diingat di sisi lain dalam kasus Ibu M tergambar pula konsep *kawula-gusti*. Dikarenakan takdir telah menetapkan kedudukan manusia seperti abdi dan tuan maka manusia tidak memiliki opsi lain selain yang sudah ditakdirkan. Akibatnya konsep ini membentuk praktik pemerintahan (Moertono, 2017). Maka memang sudah seharusnya dalam masyarakat Jawa abdi mengikuti tuan dan dalam konsep ini bukan disebut tidak bisa melawan atau lainnya. Justru *kawula* bangga akan perintah yang diberikan kepadanya, mereka justru bersyukur dan patuh akan hal tersebut. Perlu diingat pula Orang Jawa percaya bahwa raja hanyalah satu-satunya perantara yang menghubungkan manusia dan para dewa. Dimana diungkapkan oleh Pangeran Puger disaat Pangeran Cakraningrat menentangnya. Dengan kata lain raja adalah layar pemisah antara manusia dan Tuhan, dimana manusia harus melalui raja untuk mencapai Tuhan dan sebaliknya. Dikarenakan Raja dianggap sebagai perantara Tuhan maka tidak heran ketika keputusannya dianggap mutlak dan tidak dapat ditentang serta kekuatannya tanpa batas. Semua keputusan raja adalah kehendak Tuhan dan tindakan raja merupakan kehendak Tuhan. Maka apabila *kawula* ada yang kurang berkenan dengan keputusan raja harus melihat bahwa tindakan raja merupakan keputusan Tuhan dan mutlak (Moertono, 2017).

Sebenarnya aktivitas yang dilakukan PKL Malioboro baik Teras 1 dan 2 ini sudah mengikuti aturan. Secara tidak sadar para PKL sudah menaati peraturan dengan tidak kembali berjualan di trotoar seperti sebelum relokasi. PKL juga menjaga ketertiban serta kebersihan

masing-masing di setiap kiosnya. Fungsi dari Jogoboro sudah berjalan dengan semestinya. Namun perlu diketahui bahwa peraturan mengenai aktivitas untuk para PKL tidak terlalu banyak, dikarenakan dari pihak pemerintah juga masih memaklumi untuk perpindahan PKL ini, seperti yang dikatakan Bapak W:

“Sekarang masih anu, masih bebas aja, soalnya pemerintah juga menyadari keadaan seperti ini mas”

Pembicaraan dengan Bapak W merefleksikan gambaran akan konsep *kawula-gusti* lainnya. Konsep *kawula-gusti* menggambarkan saling ketergantungan antar dua unsur yang berbeda. Namun kedua unsur tersebut tidak terpisahkan. Sama halnya dengan keris. Antara sarung (warangka) dan matanya (curiga) dilihat dari penafsiran yang bersifat mistik. Sarung keris digambarkan dengan rakyat, mata keris digambarkan dengan raja. Hubungannya yaitu sarung melindungi matanya dari kerusakan, sebaliknya mata melindungi sarung agar tidak dicuri atau hilang. Raja menggambarkan mata keris, maka dari itu mata raja harus layak dengan kriteria apapun bagi rakyatnya (Moertono, 2017). Pemerintah menyadari akan kesusahan yang dialami PKL, maka dari itu Sultan saat ini masih membebaskan beberapa hal dalam proses Teras Malioboro 1 dan 2.

Foucault (1995) memberi penjelasan dalam kontrol aktivitas ada tiga metode untuk mengatur yaitu menetapkan ritme, memaksa pekerjaan tertentu, dan mengatur siklus pengulangan. Dalam kasus relokasi ini menetapkan ritme terlihat pada kegiatan mereka dalam melakukan jual beli yang ritmenya sangat sibuk. Memaksakan pekerjaan tertentu terlihat dimana para PKL melakukan pekerjaan tertentu yaitu berdagang di Teras Malioboro yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah siklus pengulangan dimana para PKL melakukan aktivitas berdagang berulang-ulang setiap harinya hingga saat ini.

c. The Organization of Geneses

Tubuh dapat memiliki kemampuan lebih. Kemampuan lebih dapat diraih dengan cara melatihnya. Melatihnya dapat dengan cara menambah aktivitas guna menambah waktu yang dilakukan tubuh. Dalam menambah aktivitas tentunya tubuh akan melakukan penyesuaian yang mengarah pada meningkatkannya kemampuan lebih tubuh (Foucault: 1995). Dalam mekanisme ini terdapat istilah yang sering dikenal dengan time-table. Time-table dapat dikatakan sebagai jadwal individu. Dalam kasus PKL Malioboro jadwal yang ada dapat terbilang unik. Dari pihak satpam saat peneliti melakukan observasi, peneliti sekaligus bertanya mengenai jam buka dan tutup Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Satpam Teras

Malioboro 1 mengatakan bahwa jam buka Teras Malioboro 1 di jam enam pagi dan tutup di jam setengah 12 malam. Sedangkan Teras Malioboro 2 buka jam tujuh pagi hingga 12 malam. Perlu diketahui bahwa jadwal ini sudah berlaku sejak kedua Teras dibuka.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa jadwal buka para PKL sebelum direlokasi berbeda dengan sesudah direlokasi. Sebelum direlokasi keterangan dari PKL mereka buka bersama dengan toko yang ada di belakangnya namun saat malam hari mereka juga masih buka dan berjualan hingga menutupi toko (karena sudah tutup tokonya). Untuk tutupnya kadang ada yang sampai toko dibelakangnya buka kembali seperti keterangan dari Ibu M:

“sewaktu-waktu saya bisa buka mas, engga tetap seumpama ada acara saya bukan jam 10/11 saya bisa, bisa jam 7 pagi kalo ga ada acara. Kalo dulu tergantung toko, kalo toko dibuka kita harus selesai soalnya ganggu toko.”

Maka dari itu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah direlokasi. Seperti keterangan dari Bapak A, beliau ini buka sesuai selernya setelah direlokasi. Bisa saja buka pagi, siang, sore, bahkan malam. Menurutnya saat ini masing-masing dari PKL bukanya tidak serempak jadi memiliki selera dan keinginan buka sesuai selernya. Untuk jam tutup beliau juga menyesuaikan kondisi saja. Walaupun sudah ada jam yang dikatakan satpam namun beliau tetap menyesuaikan dan manut saja. Berikut keterangan Bapak A:

“Kalo aktivitas ya buka biasa sesuai selera masing-masing, ada yang pagi, siang, sore, kalo masalah buka tutup. Yaa menyesuaikan situasi dan kondisinya lah. Untuk tutup rata-rata udah menyadari, kalo udah lelah nanti tutup sendiri, jarang ada yang melanggar.”

Sama halnya yang dialami Bapak W sebagai penjual makanan. Beliau tidak memiliki jam yang tetap sebagai penjual makanan. Beliau juga memiliki selera tersendiri dalam buka dan tutup lapaknya. Tidak adanya pelanggaran atau sanksi dikarenakan saat ini pemerintah masih memaklumi keadaan yang dialami PKL belum terlalu stabil seperti dulu kala. Berikut wawancaranya:

“Sekarang masih anu, masih bebas aja belum ada peraturan buka jam sekian sampe jam sekian belum ada, cuma silahkan saja. Soalnya pemerintah juga menyadari keadaan seperti ini mas, mbok menowo payu esuk, awan, ada yang berangkat dari jam 3 sampe malam itu belum ada sanksi-sanksi, belum ada perbatasan waktu. ”

Mengikuti teori Foucault sebenarnya, Sultan ini sudah memberikan time-table untuk para PKL dalam melakukan aktivitas perdagangan. Namun ternyata jadwal ini belum terlalu diterapkan oleh para PKL sepenuhnya. Para PKL masih memiliki pendapat bahwa mereka ini dapat buka sesuai keinginannya masing-masing. Keterangan di atas merupakan para PKL di Teras Malioboro 1. Sama halnya yang dialami Ibu M di Teras Malioboro 1. Beliau juga bebas dalam membuka kiosnya tidak ada jam pasti untuk beliau. Beliau mengatakan menyesuaikan keadaan, jika ada acara yang buka siang, kalo ga ada acara ya buka pagi. Untuk tutupnya Ibu M mengatakan di kisaran jam 10 hingga 11 malam melihat kondisi pengunjung. Berikut keterangan dari Ibu M:

“Ohh itu bebas, belum ada jadwal. Kalo tutup kita ya liat orang-orang, semisal jam 10 malem ga ada orang yaudah kita tutup. Ga seperti di malioboro saya bisa sampe jam 1 dan 2 pagi. Kalo pas rame ada yang sampe ga tutup. Cuman kalo dari gedungnya jam 12 ga ada orang semua lampu ya dimatikan, pintu masuk gedung di depan, samping sana ditutup. Sekarang tu jam 11 malam udah ga ada orang, semisal jam 12 masih ada orang ya ga ditutup. Soalnya saya pernah renovasi kios sampe jam 12 malem dan itu ditungguin satpam karena memang tanggung jawabnya”

Dari keterangan narasumber terlihat bahwa para PKL tetap memiliki jam buka dan tutup masing-masing. Dapat terjadi demikian karena walaupun dari pihak pemerintah sudah memberikan jadwal namun, masih minimnya ketegasan pemerintah membuat jadwal ini tidak berjalan dengan semestinya. Namun perlu diketahui Sultan masih memaklumi hal demikian karena kondisi memang belum berjalan seperti dulu, kondisi sekarang ini PKL masih terus beradaptasi dengan keadaan. Dari keterangan diatas juga dapat terlihat bahwa pengawas jadwal dari para PKL yaitu satpam setempat yang menjaga Teras Malioboro. Satpam tetap melakukan tugasnya namun dengan cara yang halus seperti yang terjadi dengan Ibu M yang mendekor kios hingga malam ditunggu oleh satpam setempat, lalu Ibu M menjadi tidak enak dan segera pergi. Terlihat bahwa satpam ini melakukan teguran namun secara halus untuk mengingatkan Ibu M.

Masing-masing narasumber juga mengatakan tidak ada jadwal khusus bagi para PKL, hanya saja PKL pada weekend tetap buka seperti biasa. Hal ini dikarenakan saat weekend biasanya para pengunjung lebih banyak daripada di hari-hari lain. Seperti keterangan dari Ibu M:

“Hari libur itu malah pas rame ramenya mas jadi tetep buka, tapi ga ada jadwal khusus. Karena harapan kita itu ramenya jumat, sabtu, minggu”

Beberapa informasi yang telah disampaikan memperlihatkan bahwa jika PKL tidak mengikuti jadwal yang ada itu terkadang ditegur oleh satpam secara halus, melihat situasi Teras apakah memang sudah sepi atau rame. Pemerintah dan satpam setempat juga merasa maklum karena Teras hingga peneliti mengambil data disitu para narasumber mengatakan belum terlalu ramai. Situasi ini yang menjadikan pemerintah tidak terlalu mengekang PKL dengan segala peraturan.

Dalam pengaturan waktunya PKL tidak terlalu dikekang atau lainnya. Sultan masih memberikan kelonggaran dan pengertian dalam pengaturan waktu PKL. Raja memberikan pengertian untuk para PKL sesuai dengan konsep *kawula-gusti*. Konsep *kawula-gusti* membuat proses komunikasi yang terdapat antara raja dan rakyat menjadi sebuah seni. Seni yang memperlihatkan perhatian seperti dalam keluarga. Dalam keluarga tentunya banyak pengertian dalam melakukan hal-hal tertentu. Dalam kasus ini pengertian diperlihatkan dalam penataan waktu yang masih longgar. Para PKL diberlakukan seperti layaknya keluarga, yang mana masih banyak kelonggaran ketika melakukan aktivitasnya. PKL juga dijaga oleh satpam setempat untuk mengawasi dan menjaga agar dagangan tetap aman.

Dalam teori Foucault jadwal yang ada harus jelas dan akurat. Melihat kasus ini jadwal para PKL tidak terlalu ketat namun hanya berdasarkan rasa tidak enak jika sudah larut malam dan belum tutup. Kasus ini tidak terlalu lancar dan akurat sesuai dengan teori Foucault namun disisi lain para PKL ini sudah dapat mengatur waktunya. Seperti ungkapan Foucault (1995), apabila tubuh sudah dapat mengatur mandiri waktu dan tambahan aktivitas maka individu mendapatkan keuntungan seperti tubuh sudah memiliki kemampuan lebih dalam mengatur penggunaan waktu.

d. *The Composition of Forces.*

Tubuh individu menjadi elemen yang dapat ditempatkan, digerakan, diartikulasikan kepada orang lain. Kekuatannya bukan lagi hal yang utama bagi tubuh, melainkan tempat yang ditempatinya. Teras Malioboro 1 dan 2 memiliki *power* untuk memberikan identitas pada tubuh PKL. Para PKL tidak perlu lagi memperkenalkan diri untuk mengatakan bahwa mereka adalah seorang pedagang. Para pembeli sudah mengetahui hal tersebut karena mereka bertempat di Teras Malioboro 1 dan 2. Seperti halnya dalam Foucault yang memberikan contoh melalui prajurit yang tubuhnya dilatih akan berfungsi bagian demi bagian untuk operasi tertentu, pada gilirannya membentuk elemen dalam mekanisme di tingkat lain. Kombinasi kekuatan ini

membutuhkan sistem komando yang tepat. Dalam kasus PKL ini juga sama dimana para PKL harus mandiri untuk mengurus lapak mereka seperti ungkapan dari Bapak W:

“yaa sebenarnya kan peraturannya kurang pas, tapi kan ini tempatnya kurang memadai sepanjang malioboro harus pindah kesini, yang dulunya panjangnya 10 meter sekarang pindah kesini dapatnya cuma lebar 1,5 meter panjang cuma sampe sini mas. Jadi ini ga bisa buat, ini aja pake kayu mas buat sendiri”

Dalam hal ini para PKL hanya disediakan tempat namun harus mengurus lapak dan barang-barang pribadi mereka secara mandiri tanpa ada arahan atau tanggapan dari Sultan. Ini sama dengan yang ada dalam Moertono (2017), dimana seorang prajurit-petani harus mengurus makanan dan penginapan secara mandiri (hanya berbentuk tikar untuk tidur/*klasa*), saat perjalanan atau ekspedisi.

Selanjutnya dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terdapat momen tertentu cara berpakaian PKL Malioboro diatur. Dalam wawancara narasumber dalam hari-hari besar tertentu para PKL dihimbau untuk menggunakan pakaian adat Jawa atau batik oleh Keraton Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika hari batik yang bertepatan pada tanggal dua Oktober, hari jadi Kota Jogja yang bertepatan pada tanggal tujuh Oktober, hari kartini yang bertepatan pada tanggal 21 April, serta hari hari tertentu seperti kamis pahing. Seperti yang dikatakan oleh Bapak W:

“Hari jadi kota jogja, kartini, kamis pahing. Kamis pahing ini dulu diwajibkan tapi orang orang banyak yang kurang, biasanya pake adat jarik. Itu kan cuma himbauan mas dari keraton”

Yang awalnya himbauan saja untuk para PKL, namun dalam kasus Bapak W beliau justru menjadi inisiatif menggunakan batik di hari tertentu ini seperti ungkapan Foucault (1995), dimana prajurit tadi akan membentuk suatu kekuatan guna membagi kekuatan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dan juga aktivitas yang mengkonstruksi prajurit dalam keterampilan fisik. Wawancaranya seperti berikut:

“Ga ada mas, kalo seperti saya kan kadang-kadang malem minggu pake batik. Itukan cuma inisiatif saya sendiri”

Perlu diketahui pakaian yang diatur oleh Keraton Yogyakarta pada hari tertentu ini tidak bersifat terlalu wajib. Informasi ini hanya bersifat himbauan saja untuk para PKL. Jikalau ada

PKL yang tidak menggunakan batik pada hari yang sudah ditentukan maka mereka tidak mendapat sanksi atau hukuman dari Keraton Yogyakarta.

Dalam kehidupan kesehariannya PKL tidak ditentukan cara berpakaian. Mereka diberikan kebebasan dalam memakai pakaian yang dianggap nyaman bagi diri mereka. Cara berpakaian PKL yang penting sopan saja, dari kesadaran diri. Seperti yang dikatakan Bapak W yang mengutarakan tentang cara berpakaian menurut beliau:

“Yaa semisal kaya pake kaos yang ga ada kerahnya itu agak gimana.”

Selanjutnya mengenai cara berpenampilan para PKL di Teras Malioboro ini tidak begitu diatur. Saat ini pemerintah kota memberikan kebebasan kepada para PKL dalam mereka mengatur penampilannya. Namun para informan dari penelitian ini walaupun tidak ada peraturan namun penampilan tetap harus rapi dan sopan tentunya. Rata-rata mereka sudah memiliki kesadaran diri akan penampilan tanpa harus ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Seperti halnya Bapak W:

“...kalo saya sebagai orang tua ya misalnya agak panjang dikit rambutnya kan risih, malu karena rambutnya aja sudah putih. Anak-anak muda itu yang bantu ada yang semiran ada yang apa, ya ternyata dari UPT juga ga ada teguran. Cuman kadang-kadang itu kerapian berdagang itu harus pake aturan”

Dalam konteks ini Bapak W sadar akan penampilan yang harus tetap dijaga walaupun belum ada peraturan yang mengatur. Menurut beliau terkadang penampilan saat berdagang bisa diatur supaya terlihat lebih sopan dan rapi. Disisi lain ada Bu Marsinem yang berpendapat bahwa penampilan tidak perlu dikasi tau, menurutnya cukup kesadaran akan cara berpakaian yang sopan saja sudah cukup:

“Ga ada mas, itu kayaknya kita udah tau sendiri lah mas ga harus dikasi tau. Iya kesadaran saja, kan kita di umum gini masa kita penampilan sama pakaian yang gitu-gitu kan agak gimana”

Dikarenakan belum adanya peraturan untuk cara berpenampilan maka tidak ada sanksi atau hukuman apapun untuk mereka yang berpenampilan berbeda atau dianggap kurang sopan serta lainnya. Namun beberapa informasi mengindikasikan bahwa cara pendisiplinan PKL ini cukup unik. Mereka tidak terlalu diatur dengan ketat namun mereka ini punya pemikiran mengenai tata cara aturan yang tidak tertulis tadi. Kembali lagi bahwa orang Jawa ini memang memiliki rasa *pekewuh* yang tinggi. Dimana mereka tidak enak ketika ada yang kurang sesuai.

Kemampuan ini justru mengarah bahwa PKL dapat beradaptasi dengan sendirinya. Sejalan dengan yang dikatakan Foucault (1995), prajurit dikonstruksi sebagai mesin yang dapat beraktivitas secara terus menerus, melakukan perintah, dan harus mudah dalam melakukan adaptasi.

Untuk peraturan berdagang, peneliti menemukan data sebagai berikut. Dalam tempatnya/kios yang ada mereka harus mematuhi garis untuk batas kios. Tidak boleh melebihi batas tersebut. Jadi batas tersebut memang dibuat agar penertiban berdagang dapat terwujud. Serta memberikan akses jalan bagi pengunjung yang berjalan. Seperti halnya yang dikatakan Ibu M:

“Kita hanya ada tinggi dan lebar harus menyesuaikan kios kan ada garis itu batasnya mas, jangan maju-maju tempatnya sih mas biar ini ga ganggu yang lain untuk jalan juga kan. Yang penting mawas diri aja mas kesadaran aja”

Lalu ada pula data lain dari Bapak W yang mana peraturan berdagang yang ada menurut beliau hanya sekedar memberikan daftar harga yang jelas agar pengunjung tidak kebingungan, namun peraturan ini tidak tertulis dan kesadaran masing-masing PKL terkhusus mereka yang berjualan makanan:

“Ga ada cuma ya kita menyadari sebagai wong Jowo itu kita harus memberikan daftar harga, tempatnya bersih itu aja dulu”

Mengenai peraturan yang ada disebutkan Ibu M ini sama di setiap PKL, mereka harus menaati peraturan tersebut guna mewujudkan ketertiban yang ingin dibuat. Namun jika ada yang melanggar satpam setempat akan menegur PKL yang melanggar batas yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk peraturan yang dikatakan oleh Bapak Widodo sebenarnya bukanlah peraturan wajib melainkan kesadaran diri saja. Hal ini berguna untuk memberikan kejelasan kepada pengunjung saat ingin membeli atau memesan makanan, karena terkadang pengunjung juga terdapat kebingungan jika tidak ada daftar harga yang jelas.

Tentunya ada beberapa hal tertentu yang tidak diatur oleh Sultan. Namun perlu diingat peran Sultan sebagai raja lagi-lagi bisa digambarkan dengan *momongan* di konsep ini. Sultan selalu memberikan pengertian dan sedikit kebebasan bagi para PKL dengan meminimalkan peraturan yang ada. Uniknyanya para PKL yang termasuk dalam *kawula* ini sudah mawas diri. Mereka walaupun tidak ada aturan seperti cara berpenampilan namun mereka tetap sadar dan mempertimbangkan penampilan karena sopan santun harus tetap dijaga.

Disiplin yang terjadi pada kasus relokasi ini menjadi unik. Disiplin yang ketat akan peraturan dan hukuman justru terdapat kelonggaran dalam kasus ini. Namun dalam hasilnya disiplin yang terkonstruksi juga sama walaupun tidak terlalu ketat akan aturan dan hukuman. Konsep *kawula-gusti* membuat proses pendisiplinan PKL menjadi lebih mudah dan terarah walaupun tidak menggunakan peraturan dan hukuman yang ketat. Ini merupakan relasi unik yang terjadi antara raja dan rakyatnya.

3.2 Pembahasan

Berbicara mengenai penataan PKL penelitian yang dilakukan Afati (2020) mengenai penataan PKL Tanah Abang terdapat kesamaan dan perbedaan pandangan dengan peneliti. Peneliti setuju akan hasil dimana penataan PKL memberikan tempat usaha yang nyaman untuk para pedagangnya. Namun perbedaan pandangan terdapat pada memberikan tempat usaha yang lebih baik dan mengurangi macet dalam disekitarnya. Hal ini dikarenakan dalam proses wawancara PKL yang dilakukan peneliti mereka memang mengakui bahwa tempat yang ada sekarang lebih nyaman dari pada sebelumnya, karena hujan tidak keujanan serta panas tidak kepanasan. Namun para PKL ini tidak merasa baik dalam tempat usahanya sekarang, mereka justru lebih suka dengan tempatnya dahulu dimana mereka dapat berjualan dengan lebih baik. Dikarenakan sebelum direlokasi dagangan mereka lebih terjamah oleh pengunjung yang selalu lalu lalang di depan mereka. Tidak seperti apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya yang kedua penataan PKL Malioboro tidak terlalu mengurangi macet yang ada. Saat peneliti melakukan observasi, Jalan Malioboro tetap macet seperti biasanya padahal PKL sudah ditata ke Teras Malioboro. Perlu diketahui bahwa saat peneliti melakukan observasi dan wawancara terjadi pada hari selasa dan bukan weekend. Masih dari penelitian Afati yang mendapatkan hasil dimana penataan PKL dapat meningkatkan ekonomi para pedagang. Berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh peneliti dimana para PKL Malioboro justru mengeluh dikarenakan pendapatan ekonomi mereka turun drastis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Aotama dan Klavert (2021), dimana terdapat banyak kesamaan dalam hasil dan pembahasan dengan apa yang terjadi di PKL Malioboro. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa dampak dari relokasi PKL mereka mendapat jaminan keamanan dan ketertiban usaha. Sama dengan apa yang terjadi pada PKL Malioboro dimana mereka mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dikarenakan ada satpam setempat serta petugas Jogoboro. Kesamaan lainnya seperti dimana para PKL dijamin pula kenyamanan dan kebersihan setempat. PKL Malioboro ini kebersihan setempat memang tanggung jawab pedagang, namun disamping itu terdapat petugas kebersihan yang selalu membersihkan ruang

setempat. Hasil dari penelitian Aotama dan Klavert menemukan bahwa PKL tidak perlu lagi bongkar muat. Sama halnya yang terjadi pada PKL Malioboro mereka sudah diberikan tempat sesuai lotre yang mana mereka setiap harinya tidak perlu bongkar muat lagi jika ingin membuka kios. Namun tetap ada perbedaan pandangan dimana dalam penelitian Aotama dan Klavert tingginya tingkat persaingan di lokasi relokasi membuat para pedagang takut kehilangan konsumen. Kebalikan dari hal itu justru PKL Malioboro bersama berjuang agar seluruh kios bisa rame dan terjamah oleh pengunjung setempat. Mereka justru saling merangkul untuk berjuang bersama.

Penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah (2019) sangat relevan dengan yang terjadi pada PKL Malioboro. Penelitian Miftahul Janah mendapat hasil bahwa setelah direlokasi PKL merasakan bahwa tempat baru untuk berdagang kurang strategis. Mereka juga merasakan bahwa pelanggan yang ada sangat berkurang drastis. Tentunya ini akan mengarah ke pendapatan pedagang yang berkurang setelah direlokasi. Memiliki kesamaan yang cukup tinggi dengan apa yang terjadi pada PKL Malioboro. Setelah dilakukan relokasi PKL Malioboro justru mengeluh karena merasa bahwa kios menjadi sepi pelanggan, karena mereka menganggap tempat yang ada kurang strategis. Akibatnya perekonomian PKL Malioboro menjadi berkurang dan tentunya pendapatan juga berkurang.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ita Sugnilitas dkk (2017) mengenai cara proses komunikasi proses relokasi masyarakat Kendari. Dalam penelitian ini terdapat dua hasil yaitu dengan cara informatif dan persuasif. Kedua teknik ini ternyata juga dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam merelokasi PKL Malioboro. PKL Malioboro diberikan informasi yang relevan tentang relokasi di awal sebelum relokasi dijalankan. Para PKL paham akan harus dipindah dan sebagainya. Yang kedua secara persuasif pemerintah kota Yogyakarta memberikan arahan bahwa setelah Teras Malioboro 1 dan 2 jadi maka para PKL harus pindah. Terdapat kesamaan antara apa yang ditemukan peneliti dengan penelitian Ita dkk.

Penelitian dari Erwin S dan Ahmad Sukri H (2020) ini tentang relokasi pasar Sibuhuan. Banyak hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, namun yang sependang dengan apa yang dilakukan peneliti hanya beberapa hal. Pertama dalam penelitian ini yang sama yaitu respon kurang baik dari para PKL. Para PKL Malioboro memang tidak merespon baik proses relokasi ini karena mereka sudah nyaman dengan yang dulu dan dagangan mereka lebih rame saat dulu. Kedua akibatnya pedagang menolak direlokasi. Kesamaan ini terjadi ketika para PKL menolak relokasi bahkan sebelum dilaksanakan proses tersebut. Yang terakhir adalah para PKL

merasakan bahwa barang dagangan lebih cepat habis saat sebelum relokasi. Hal ini dialami para PKL Malioboro ketika peneliti mewawancarai narasumber, dimana mereka menceritakan keluhan kesahnya dimana dagangannya tidak pernah habis. Mereka memutar otak untuk menemukan barang yang sedang laku dibeli pengunjung. Bahkan ada PKL yang utang hanya untuk membeli barang yang sedang laku di kalangan pengunjung.

Selanjutnya sangat berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh Hafidzhi dan Sugiri (2020). Dalam penelitian ini relokasi dianggap berhasil, sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di PKL Malioboro. Penelitian Hafidzhi dan Sugiri (2020) mendapatkan hasil yaitu pendapatan pedagang menjadi meningkat dan fasilitas yang ada sudah sesuai setelah direlokasi. Sangat bertolak belakang dengan yang ditemukan peneliti di lapangan. Apa yang terjadi pada PKL Malioboro tidak semanis penelitian yang dilakukan Hafidzhi dan Sugiri. Pendapatan PKL Malioboro tidak meningkat setelah direlokasi, justru malah turun drastis karena pengunjung sepi tidak seperti sebelum relokasi. Fasilitas yang didapat PKL Malioboro tidak terlalu sesuai mengingat saat peneliti observasi Teras Malioboro 1 dan 2 masih ada atap yang bocor dan di Teras 2 masih banjir, kebetulan saat itu peneliti observasi di kala sedang hujan.

Terakhir penelitian yang dilakukan Alfian S dkk (2021). Penelitian membahas mengenai relokasi masyarakat Kalijodo. Penelitian ini menemukan bahwa pemukiman Kalijodo membuat warga sekitar resah. Mungkin ini dapat dikatakan sedikit kesamaan antara apa yang ditemukan Alfian dan peneliti. Sama halnya yang ditemukan Alfian, peneliti juga menemukan bahwa PKL Malioboro ini memberikan keresahan bagi para pemilik toko sebelum direlokasi. PKL Malioboro dianggap menutupi dan mengganggu toko di belakangnya. Akibatnya toko mengadu ke pemerintah setempat dan momen ini dijadikan Sultan untuk sekalian merelokasi seluruh PKL Malioboro.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggambaran Sultan dalam sejarah Kraton Jawa terlihat dalam konsep relasi *kawula-gusti*. Seperti yang dituliskan Moertono (2017) dimana konsep *kawula-gusti* menggambarkan status manusia yang paling rendah dan paling tinggi dalam masyarakat. Maka selanjutnya akan terdapat dua lapisan dalam kehidupan Jawa yaitu wong cilik (orang biasa) dan penggede (penguasa). Konsep ini tidak dilihat dari faktor ekonominya, namun dilihat dari segi tuan dan hamba, serta tempat dalam masyarakat seperti posisi sosial dalam masyarakat. Maka demikian hak dan kewajiban keduanya dianggap sudah ditakdirkan. Sultan juga dianggap sebagai layar, yang mana jikalau manusia ingin berhubungan dengan Tuhan harus melalui raja, sebaliknya juga sama raja harus dilalui Tuhan jika ingin berurusan dengan manusia. Dikarenakan raja sebagai penghubung tunggal antara manusia dan Tuhan, maka tidaklah aneh ketika raja mengeluarkan keputusan tidak dapat ditentang atau diperdebatkan dan harus diketahui bahwa kekuasaannya tanpa batas. Kembali lagi konsep ini dikarenakan semua keputusan raja dianggap sebagai kehendak Tuhan. Ada pula gambaran lain seperti konsep wewenang *murba wisesa*. Tuhan dianggap sebagai *Murbawisesa* atau Penguasa Tertinggi. Dalam konsep kelas sosial raja diletakkan di bagian yang jauh dari jangkauan orang biasa.

Gambaran ini perlu dilihat dan dipahami dengan seksama. Penggambaran Sultan dalam sejarah memang sekilas terlihat mulia karena dianggap wakil Tuhan. Namun jika dilihat kembali relasi antara *kawula-gusti* ini justru memperlihatkan cara berpikir dimana raja bisa memerintahkan apapun kepada rakyatnya tanpa ada perdebatan atau keberatan dari rakyatnya. Seperti yang sudah dituliskan diatas bahwa konsep ini akan membuat dua lapisan dalam kehidupan Jawa yaitu wong cilik (orang biasa) dan penggede (penguasa). Serta menjadikan kelas sosial raja diletakkan di bagian yang jauh dari jangkauan orang biasa. Maka ketika raja memerintah rakyatnya mereka hanya bisa patuh saja.

Dalam penertiban PKL Malioboro Sultan menjadi seseorang yang memberikan keputusan mutlak. Sultan yang memerintahkan untuk dilakukan relokasi kepada para PKL Malioboro. Setelah dilakukan relokasi peran Sultan sedikit menghindar dari para PKL. Sultan lebih memilih untuk menunjuk UPT dan pemerintah setempat untuk

mengurusi PKL setelah relokasi. Kejadian seperti pembagian ruang juga merupakan cerminan Sultan untuk menghindari konflik pedagang. Pembagian ruang yang identik dengan konflik diselesaikan dengan cara undian saja.

Peran wacana sendiri dalam *event* ini nampak jelas dalam latar belakang dilakukannya relokasi. Dimana telah disampaikan oleh Sultan dimana alasan relokasi salah satunya dilakukan karena untuk melestarikan sumbu filosofi. Peran sejarah dalam hal ini menjadi alasan kuat dan sebagai dasar dilakukannya relokasi PKL Malioboro. Sumbu filosofi yang diusulkan Sultan menjadi warisan budaya ke UNESCO mengharuskan Sultan melakukan relokasi terhadap PKL di area Malioboro.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, kendala yang pertama dialami peneliti yaitu dalam mencari data penelitian. Kendala pertama terdapat dalam literatur yang sulit ditemui. Penelitian ini menggunakan literatur sejarah mengenai kerajaan Mataram Islam. Peneliti kesulitan dalam mencari sumber buku yang dapat menunjang penelitian ini seperti penjelasan mengenai pasar di Jawa yang sulit ditemukan peneliti. Serta penjelasan mengenai tata kota mataram yang masih sedikit sumber literatur yang membicarakan hal tersebut. Ditambah lagi penelitian ini termasuk dalam kajian komunikasi geografi yang di Indonesia masih banyak yang belum paham akan hal tersebut. Kebaruan dan keterbatasan tema dari penelitian ini membuat peneliti kesusahan dalam menemukan rujukan yang dapat menunjang penelitian ini. Kurang lebih tiga hingga empat kali peneliti mengganti teori untuk bisa menyesuaikan dengan pembahasan mengenai peran Sultan, Relokasi, dan PKL Malioboro. Terdapat lagi kesulitan dimana sumber bacaan yang dapat menunjang penelitian kebanyakan memakai bahasa inggris, maka dibutuhkan waktu untuk mengartikan dan memahami sumber bacaan tersebut.

Selanjutnya kendala yang lain dari pelaksanaan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara partisipan bersama tiga narasumber yang terdampak relokasi dan observasi. Dikarenakan menggunakan metode wawancara partisipan dan observasi maka peneliti harus terjun langsung selama satu hari penuh di lapangan. Untuk satu narasumber peneliti perlu waktu kurang lebih 30-40 menit untuk wawancara. Kendala dalam wawancara terkadang PKL kesusahan dengan bahasa dan maksud pertanyaan penelitian, maka peneliti harus menyederhanakan serta memperjelas pertanyaan penelitian. Kendala lainnya seperti PKL terkadang

memberikan jawaban yang terlalu singkat, maka harus menggali lagi untuk mendapat data yang diinginkan. Kendala lainnya seperti dibutuhkan waktu yang cukup banyak dalam melanjutkan proses setelah wawancara narasumber. Seperti menuliskan transkrip wawancara, menganalisis dan menyimpulkan temuan. Peneliti juga berpikir bahwa narasumber memiliki pendapat sendiri mengenai tema penelitian. Maka pemikiran pedagang satu dengan lainnya berbeda dan belum tentu dapat dipukul rata untuk seluruh PKL.

Keterbatasan lainnya dimana riset ini menggunakan teori disiplin Michel Foucault yang membahas mengenai peraturan dan kebijakan. Dalam riset ini tidak terlalu dibahas akan hal tersebut. Dalam disiplin Foucault juga selalu dijelaskan jika ada hukuman apabila melanggar peraturan. Dalam riset ini justru hal tersebut juga tidak terlalu nampak. Riset ini juga berkaitan dengan pedagang, namun untuk pembahasan antropologi pedagang memang belum terlalu lengkap. Riset ini lebih melihat cara menggunakan komunikasi ruang, maka dari itu antropologi pedagang tidak terlalu dibahas, justru fenomena sosial relokasinya yang lebih diperhatikan dalam riset ini.

C. Saran/Rekomendasi

Dalam relokasi PKL Malioboro masih terdapat banyak PKL yang mengeluhkan beberapa hal. Peran Sultan sebagai raja diharapkan dapat memberikan suatu jalan terang untuk para rakyatnya terkhusus para PKL. Sejarah mataram memperlihatkan kita gambaran apa yang baik dan buruk dari pemimpin saat itu. Ada baiknya perilaku yang baik diteruskan dan yang buruk tersebut berhenti sampai sini saja dan memberikan acuan baru dimana raja benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang sesungguhnya kepada rakyatnya. Manfaatkanlah posisi pemimpin untuk memuliakan rakyatnya yang sudah bersama-sama membangun daerah ini.

Penelitian mengenai relokasi PKL dilihat dari kajian komunikasi geografi dan disiplin masih terbilang baru dalam dunia penelitian, setidaknya di Indonesia. Dengan sedikitnya riset mengenai disiplin pada pedagang khususnya PKL Malioboro maka diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya akan membahas mengenai PKL Malioboro dalam riset mereka. Diharapkan pula dalam pembahasan PKL Malioboro akan menggunakan perspektif yang tidak biasa, gunakanlah perspektif yang masih jarang digunakan dalam penelitian mengenai PKL. Sehingga pembahasan PKL akan lebih banyak perspektif dan melengkapi warna dalam dunia penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, W, M. (2021). Antara Kuasa Kebohongan dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian pada Hoaks Pandemi Corona di Indonesia, Vol. 10, No. 1.
- Afiati, Noor. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang).
- Alhazmi, A, P. (2020). Nilai Ruang Terkini Alun-Alun Utara pada Kota Yogyakarta, Vol. 3, No. 1.
- Alisjahbana. (2006). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya: ITS press.
- Andersen, Niels, A. (2003). Discursive Analytical Strategies (Understanding Foucault, Kosselleck, Laclau, Luhmann). United Kingdom: The Policy Press.
- Anderson, B. (1990). Kuasa Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Yogyakarta: MataBangsa.
- Anggito, Albi; Setiawan Johan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Antara. (17 Januari 2022). Seluk Beluk Masalah Relokasi PKL Malioboro: DPRD Bentuk Pansus. Diambil dari: <https://tirto.id/seluk-beluk-masalah-relokasi-pkl-malioboro-dprd-bentuk-pansus-gnNe>
- Aotama, Christian; Henny Rosaline. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon.
- BPK. Diakses (4 Oktober 2022) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro. Diambil dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32170>
- CNN Indonesia. (26 Januari 2022). Relokasi 1700 PKL Malioboro, Sultan Umumkan Tempat Baru Sore Ini. Diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126072902-20-751273/relokasi-1700-pkl-malioboro-sultan-umumkan-tempat-baru-sore-ini>
- Dhona, H, R. (2018). Komunikasi Geografi. Dalam Jurnal Komunikasi, Vol. 13, No. 1.
- Dhona, H, R. (2020). Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi, Vol. 9, No. 2.

- Farrel, Clare. (2005). Michel Foucault. London: Sage Publications.
- Fauziah, S, M, N. (2018). Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941, Vol. 14, No. 2.
- Foucault, Michel. (1995). Discipline and Punish The Birth of the Prison. Vintage Books: New York
- Foucault, Michel. (2002). The Archeology of Knowledge. London: Routledge.
- GARUDA. Diakses (17 Mei 2022). Pencarian relokasi berdasar judul dan penerbit program studi ilmu komunikasi. Diambil dari: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents?select=title&q=relokasi&pub=program+studi+komunikasi>
- GARUDA. Diakses (3 Juli 2022). Pencarian berdasar kata kunci sultan istimewa. Diambil dari: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents?select=title&q=sultan+istimewa&pub=>
- Goenawan, R & Harnoko. (1993). Sejarah Sosial Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan. Jakarta: CV. Manggaka Bhakti.
- Hafidzhi, A; Sugiri, A. (2020). Tingkat Keberhasilan Relokasi Ruang Bagi Pedagang Pada Penataan Pasar Marelان Kota Medan.
- Hall, Stuart. (1992). *Ideology and Communication Theory dalam West-Turner*.
- Hikmawan, M, D & Ismalia, D. (2019). Relasi Kuasa di Ruang Publik: Menakar Konflik Transportasi Online dan Konvensional di Kota Serang, Vol. 1, No. 2.
- Jannah, Miftahul. (2019). Analisis Dampak Relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima.
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia, Vol. 9, No. 1.
- Kallman, M; Dini R. (2017). An Analysis of Michel Foucault's Discipline and Punish.
- KBBI. Diakses (17 Mei 2022). Arti kata relokasi. Diambil dari: <https://kbbi.web.id/relokasi>

- Littlejohn, Stephen, W. (2017). Theories of Human Communication, Eleventh Edition. United States Amerika: Waveland Press.
- Mchoul, Alec; Grace, Wendy. (2002). A Foucault Primer Discourse, Power, and the Subject. London and New York: Routledge
- Mills, Sara. (2001). Discourse. Taylor & Francis e-Library.
- Mills, Sara. (2005). Routledge Critical Thinkers Michel Foucault. Taylor & Francis e-Library.
- Moertono, S. (2017). Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX. Jakarta: PT Gramedia.
- Mulyana, D. (2014). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D; Rahmat, J. (2014). Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pangaribo, W,S. (2022). Setelah PKL Direlokasi, Aura Malioboro Jadi Beda dan Sepi. Diambil dari: <https://travel.kompas.com/read/2022/02/08/210134127/setelah-pkl-direlokasi-aura-malioboro-jadi-beda-dan-sepi?page=all#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20mulai%201%20Februari,baru%20dalam%20rangka%20penataan%20kawasan.&text=Lokasi%20baru%20para%20PKL%20ada,eks%20Kantor%20Dinas%20Pariwisata%20DIY.>
- Pangaribowo ,W ,S. (20 Januari 2022). PKL Malioboro Direlokasi Pindah ke Mana?. Diambil dari: <https://travel.kompas.com/read/2022/01/20/202316127/pkl-malioboro-direlokasi-pindah-ke-mana?page=all>
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017. Diambil dari: <https://jdih.jogjakota.go.id/asset/naskah/Perwal%20No%20135%20Tahun%202017%20ttg%20Pembentukan,%20Susunan%20Organisasi,%20Kedudukan,%20Fungsi,%20Tugas%20dan%20Tata%20Kerja%20Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Pusat%20Pengelolaan%20Kawasan%20Malioboro%20Pada%20Dinas%20Pariwisata%20Kota%20Yogyakarta.doc>
- Permadi, G. (2007). Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini. Yudhistira
- Purnomo, R, A. (2016). Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto, Vol. 11, No. 1.

- Ransom, John, S. (1997). Foucault's Discipline The Politics of Subjectivity. Duke University Press: Durham and London
- Rusdiarti, S, R. (2008). Struktur dan Sifatnya dalam Pemikiran Michel Foucault.
- Rustan, A, S & Hakki, N (2017). Pengantar Ilmu Komunikasi. Sleman: CV Budi Utama.
- Safitri, Detia. (2020). Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi (Studi di Pasar Angso Duo).
- Saputra, S & Dhona, H, R. (2022). Dispersi Wacana Ruang Publik di Harian Umum Kompas, Vol. 11, No. 2.
- Setiawan, S, D. (25 Januari 2022). Relokasi PKL Malioboro Masih Tuai Kontroversi. Diambil dari: <https://republika.co.id/berita/r69og1291/relokasi-pkl-malioboro-masih-tuai-kontroversi>
- Setiawan, S, D. (4 Februari 2022). PKL Direlokasi, Muncul Permasalahan di Teras Malioboro. Diambil dari: <https://repjogja.republika.co.id/berita/r6s65k291/pkl-direlokasi-muncul-permasalahan-di-teras-malioboro>
- Siregar, Erwin; Harahap, Sukri. (2020). Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Sibuhuan 2013-2018.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault.
- Sugiyanto, D. (2016). Artikulasi Politik dalam Gending Pakurmatan Miyos Dalem SISKS Pakubuwana dan KGPAA Mangkunegara.
- Sugnilitas, Ita; Larisu, Zulfiah; Fachruddin, Sutiya. (2017). Teknik Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Relokasi Masyarakat Kota Lama Kelurahan Kadai Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Supriyono, A. (2009). Sistem Pertanahan Jaman Kerajaan Mataram Islam
- Suratno. (2003). Tata Kota Tradisional Jawa Sebagai Penunjang Pariwisata di Kotagede Yogyakarta, Vol. 5, No. 1.
- Suriati & Samsinar & Rusnali, A. N. A. (2022). Pengantar Ilmu Komunikasi. Tulungagung: Akademia Pustaka.

- Suromihardjo, A. (2000). Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Suryanto, dkk. (2015). Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Vol. 26, No. 3.
- Susanto, Heri. (24 Januari 2022). Polemik Relokasi, Kata Pansus dan Ancaman PKL Balik Jualan di Malioboro. Diambil dari: <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5912746/polemik-relokasi-kata-pansus-dan-ancaman-pkl-balik-jualan-di-malioboro>
- Sutantio, A; Ismawan, Guntur; Arifandy, M; Hantono, Dedi. (2021). Dampak Relokasi Terhadap Perubahan Ruang dan Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kalijodo di Jakarta.
- Syafiuddin, Arif. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).
- Tahmidaten, L & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya), Vol. 10, No. 1.
- Tifani. (27 Januari 2022). Hikayat Malioboro, Pusat Perdagangan Berusia 300 Tahun di Yogyakarta. Diambil dari: <https://jateng.liputan6.com/read/4870007/hikayat-malioboro-pusat-perdagangan-berusia-300-tahun-di-yogyakarta>
- Urfan, dkk. (2022). Manifestasi Konsep kosmologi Jawa dalam Perkembangan Pola Ruang Kawasan Pusat Pemerintahan Surakarta, Vol. 17, No. 2.
- Wicaksono, Pribadi. (18 Januari 2022). PKL Malioboro Tolak Relokasi, Pemerintah Yogyakarta: Minggu Depan Pindah. Diambil dari: <https://travel.tempo.co/read/1551331/pkl-malioboro-tolak-relokasi-pemerintah-yogyakarta-minggu-depan-pindah/full&view=ok>
- Wicaksono, Pribadi. (27 Januari 2022). 4 Alasan Sultan HB X Tetap Merelokasi PKL Malioboro Awal Tahun Ini. Diambil dari: <https://nasional.tempo.co/read/1554470/4-alasan-sultan-hb-x-tetap-merelokasi-pkl-malioboro-awal-tahun-ini>
- Wodak, R; Meyer, M. (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage Publication

Yasin, M. (2015). Komunikasi Pendidikan: Menuju Pembelajaran Efektif. Kediri: STAIN Kediri Press.

